



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT SEMENTARA
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 6 Juli 2020
Waktu	: 10.30 WIB s.d 13.26 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat Acara	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) : Membahas <i>Progress Report</i> Mengenai Program Strategis Kementerian Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: Dari 46 orang 55 Anggota Komisi IV dengan rincian:

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)

12 dari 12 orang Anggota

1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
3. Ir. Mindo Sianipar
4. Ir. Effendi Sianipar
5. Ono Surono, S.T.,
6. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
7. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
8. Drs. I Made Urip, M.Si.
9. H. Yadi Srimulyadi
10. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
11. Maria Lestari, S.Pd.

12. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

6 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Budhy Setiawan
4. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
5. A.A Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
6. Alien Mus, S.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil ketua Komisi IV DPR RI)
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Renny Astuti, SH., S.PN.
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess., M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

6 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Ahmad HI M. Ali, S.E.
4. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
5. H. Charles Meikyansah
6. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

6 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Drs. H. Ibnu Multazam
4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
5. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
6. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

1 dari 5 orang Anggota

1. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

2 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

4 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
3. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
4. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maosul, S.Sy.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan)
4. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan

10. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
11. Farida Mokodompit, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Persero);
12. M. Yana Aditya, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero);
13. Budi Sasongko, Direktur Utama PT Garam (Persero); dan (hadir secara virtual);
14. Arief Haendra, Direktur Pengembangan PT Garam (Persero).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya,
Yang terhormat Perum Perikanan Indonesia,
Yang terhormat Direktur Utama PT Perikanan Nusantara,
Yang terhormat Direktur Utama PT Garam,
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali Rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 30 April 2020 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 17 Juni 2020, pada hari ini Senin tanggal 6 Juli 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam membahas *Progress Report* mengenai program strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Dampak Covid-19.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Rapat Kerja hari ini kami buka dan dinyatakan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat Kerja hari ini dimulai pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai sesuai Pasal 254 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib dan/atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan;

5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu sekalian.

Menurut Tatib karena ini belum kuorum, baru 26 fisik dan virtual rapat ini dibuka kita skors 5 menit.

(RAPAT DISKORS)

Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi atas capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 dengan realisasi penyerapan anggaran sebanyak 43,86% atau sebesar Rp2,01 triliun dari pagu sebesar Rp4,6 triliun per 3 Juli 2020, di mana berada di urutan 38 dari 85 Kementerian Lembaga. Selain itu, Komisi IV DPR RI mengapresiasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan padat karya dan bantuan sosial yang secara nyata negara hadir di tengah-tengah masyarakat akibat pandemi Covid-19. Terutama yang telah mencapai di atas 25% seperti Gemar Makan Ikan 64%, Bakti Mutu Karantina 83%, Bakti Nelayan 41%, Pelatihan Masyarakat 59%, Pendidikan Vokasi 31%, Bantuan Benih Ikan 33%, Calon Indukan 35%, Pakan Ikan 28%. Adapun program dan kegiatan perlu didorong percepatan penyalurannya yang masih dibawah 25% seperti Asuransi Nelayan, Asuransi Budidaya, Kluster Budi Daya Udang, Mesin, Dan Bahan Baku Pakan, Rumput Laut, Bio Flok, Mina Padi, Ikan Hias, KJA Lobster, Repitalisasi Tambak, Maggot, *Cold Storage*, Rehab Mangrove, serta Kelompok Penggerak Konservasi, Pugar Wisata Bahari serta Kelompok Masyarakat Pengawas, ekspor, serta BLU LPUMKP guna membantu memulihkan ekonomi Pelaku Sektor Kelautan dan Perikanan, yaitu Nelayan Pembudidaya Ikan, Petambah Garam, Pengolah Dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta Masyarakat Pesisir.

Sementara itu, terkait dengan pelayanan system perijinan kapal masih perlu banyak perbaikan. Seperti halnya program Silat (Sistem Informasi Layanan Cepat). Jadi beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri mengatakan mengurus perijinan itu satu jam atau tiga jam itu? Satu jam, saran saya tidak perlu bilang satu jam. Satu kali 24 jam sudah sangat baik sekali, karena apa? Dibandingkan yang dulu kan bisa berbulan-bulan, jadi kalau 1 jam saya pikir tidak laik, ngetik dan periksa dokumen dan lain-lain. Saran saya buat saja sistemnya 1 kali 24 jam, berarti ada waktu untuk memeriksa dokumen, melihat, mengetik, jangan sampai ada yang lolos atau lalai.

Selanjutnya mohon dijelaskan sejumlah regulasi dan kebijakan di bukanya ijin ekspor benih lobster yang sedang viral saat ini. Namun, ada beberapa program yang kurang tercapai pemanfaatannya serta pelaku utama perikanan, yakni program pelatihan masyarakat kelautan perikanan karena setelah pelatihan di webinar tidak ada kelanjutannya lagi. Pembinaan serta pengembangannya diperlukan kerja sama dengan Eselon I dengan Eselon I lainnya.

Pimpinan serta Anggota Komisi IV DPR RI, mendorong dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan agar semua program prioritas dapat dipublikasikan secara baik, benar, utuh, transparan. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang atas capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia.

Hal yang paling mendasar adalah temuan-temuan BPK segera diselesaikan. Dan apabila program-program sudah menjadi temuan BPK agar dievaluasi ulang untuk dijalankan pada tahun berikutnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas.

Kami persilakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dr. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua,
Om swasti astu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI, para pejabat Eselon I beserta seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Utama Perinus, Direktur Utama Perindo, Direktur Utama PT Garam, para hadirin sekalian yang kami hormati.

Pujii syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membahas *Progress Report* mengenai Program Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Dampak Covid-19.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Ijinkan pertama-tama kali melaporkan realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 per 3 Juli 2020 mencapai 38,19% dari pagu Rp4,6 triliun. Dan apabila realisasi tersebut digabungkan dengan *outstanding contract* menjadi 43,86%. Realisasi ini menempatkan KKP berada di urutan 38 dari 85 Kementerian dan Lembaga. Selanjutnya KKP akan terus meningkatkan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana arahan Presiden pada Sidang Kabinet 18 Juni Tahun 2020.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19, kegiatan yang telah dilakukan oleh KKP, antara lain:

Yang pertama, Bakti Nelayan telah selesai seluruhnya dilaksanakan di 34 pelabuhan perikanan pada periode April sampai Juni 2020 dengan kegiatan Bakti Nelayan Sehat, Bakti Sehat berupa penyemprotan desinfektan di kapal, UPI dan TPI, Penyediaan Fasilitas Kebersihan Tangan, Pembagian Masker, Pemberian Vitamin dan Herbal lainnya kepada 8.428 nelayan dan 7.744 non nelayan. Bakti Sosial berupa Pemberian Sembako sebanyak 13.707 paket. Bakti Usaha berupa pojok pendanaan di mana sebanyak 74 debitur melakukan akad kredit dengan nilai kredit Rp9,52 miliar.

Yang kedua, Bulan Mutu Karantina telah selesai seluruhnya dilaksanakan di 47 UPT BKIPM selama periode Mei sampai Juni 2020. Dengan kegiatan pembagian 73.751 paket untuk 183 Kabupaten/Kota. *Restocking* benih ikan di Embung Sidodai Kalimantan Selatan sebanyak 40 ribu ekor benih Ikan Papuyu dan di Sungai Sikayang Kalimantan Barat sebanyak 10 ribu ekor Ikan Baung. Sebagaimana arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membagikan ikan kepada masyarakat di daerah dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh melawan Covid-19, yaitu dengan makan ikan yang sehat.

Untuk itu, kegiatan safari Gemar Makan Ikan diperluas kegiatannya sekaligus membantu penyerapan produk UMKM di mana KKP juga memfasilitasi digitalisasi pemasaran secara *online* dalam rangka mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Kegiatan perluasan safari Gemar Makan Ikan selama bulan April 2020 telah direalisasikan pemberian 15 ribu paket produk olahan ikan kepada 10 ribu rumah sakit. 11.800 paket produk olahan untuk pekerja harian pengemudi ojek dan taksi. Dan 18,25 ton ikan kembung untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Yang keempat, safari Gemar Makan Ikan selama periode Juni 2020 juga telah membagikan 34 ribu paket produk perikanan segar, beku, maupun olahan di 74 lokasi di 61 Kabupaten/Kota di 17 provinsi. Kelima, bantuan benih ikan telah direalisasikan sebesar 119,7 juta ekor dari target 215,7 juta ekor, terdistribusi pada 848 penerima di 23 provinsi, 127 Kabupaten/Kota dan 66 lokasi *Restocking*. Keenam, bantuan calon induk telah direalisasikan

sebanyak 328 ribu ekor dari target 1 juta ekor. Terdistribusi pada 240 penerima di 11 provinsi dan 37 Kabupaten/Kota.

Tujuh, bantuan bibit rumput laut telah direalisasikan sebanyak 41ton dari target 200 ton. Terdistribusi di 4 provinsi dan 7 kabupaten kota. Delapan, bantuan budidaya bioflok sampai dengan saat ini sebanyak 16 paket dalam pengerjaan dan 105 paket proses PBJ dan 170 paket proses verifikasi. Sembilan, bantuan budidaya mina padi baru terealisasi 6 paket, 50 paket proses PBJ, 35 paket menunggu musim tanam dan 9 paket proses verifikasi calon lokasi.

Sepuluh, pengelolaan irigasi tambah partisipasi atau PITAP merupakan kegiatan padat karya metode swakelola untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak Covid-19 dan perbaikan infrastruktur dikawasan irigasi perikanan. Target bantuan sebanyak 10 paket di 9 provinsi dan 10 Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp3,5 miliar. Progress kegiatan ini telah dilakukan verifikasi calon lokasi di 5 provinsi, 6 Kabupaten/Kota, dan sosialisasi di 4 provinsi, 4 kabupaten kota.

Yang kesebelas, bantuan percontohan ikan hias. 7 paket proses pelaksanaan pekerjaan, 28 paket proses PBJ, 4 paket proses penetapan SK, 11 paket proses verifikasi calon penerima. Dua belas, asuransi usaha budidaya telah dilakukan verifikasi usulan di 27 provinsi, 120 Kabupaten/Kota dengan total luas lahan 11.484,27 hektar. Tiga belas, bantuan mesin dan bahan baku pakan masih dalam proses verifikasi calon penerima.

Empat belas, bantuan pakan telah diproduksi pakan mandiri sebanyak 307,92 ton. Terdistribusi 293,19 ton untuk 224 kelompok di 14 provinsi dan 49 Kabupaten/Kota. Lima belas, bantuan KJA budi daya lobster merupakan perconohan kluster lobster di provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini telah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap 52 calon penerima bantuan. Target penebaran direncanakan pada September 2020, sehingga Mei 2021 lobster budidaya sudah dapat dipanen.

Enam belas, bantuan sarana pendukung revitalisasi tambak di 4 provinsi, saat ini sedang dalam proses katalog sektoral KKP untuk pengadaan kincir dan kompa. Selain itu, telah dilakukan evaluasi terhadap usulan 16 calon penerima di 4 provinsi, 4 Kabupaten/Kota. Tujuh belas, KKP juga telah mengembangkan model kluster budi daya udang di 5 lokasi dengan skema perhutanan sosial seluas 2.650 hektar di Kabupaten Lampung Selatan dan skema tambak masyarakat seluas 5.523 hektar di Kabupaten Cianjur, Sukamara, Aceh Timur, dan Buwel yang saat ini telah dilakukan verifikasi lahan. Selain itu, KKP juga mengembangkan model milenial shrimp farm di 2 unit UPT KKP, yaitu BPBAP Situbondo dan Balai Perikanan Budidaya Jepara yang saat ini sedang persiapan lahan dan lelang pengadaan.

Delapan belas, percontohan budi daya maggot di masyarakat dengan dalam tahap identifikasi dan verifikasi lokasi. Selain itu, percontohan budi daya maggot yang dilaksanakan di UPT Jepara telah dilakukan perencanaan

dan pembuatan desain bangunan serta persiapan proses lelang fasilitas dan peralatan budi daya maggot sesuai petunjuk teknis.

Sembilan belas, pembangunan *cold storage* saat ini dalam persiapan lelang konstruksi. Untuk pekerjaan konstruksi direncanakan minggu ketiga Agustus sehingga diharapkan pada Desember dapat beroperasi. Dua puluh, pengembangan usaha garam rakyat, berupa kegiatan padat karya integrasi pergaraman dengan target 150 hektar. Saat ini 3 lokasi sudah dalam pekerjaan, Gresik, Kerawang, Demak. 5 lokasi proses pengadaan, Pati, Pamekasan, Indramayu, Brebes, Jenepono. Dan 4 lokasi proses verifikasi dokumen perencanaan Tangkep, Bima, Rembang, Tuban.

Dua puluh satu, rehabilitasi kawasan mangrove merupakan kegiatan padat karya berupa penanaman mangrove seluas 200 hektar di 8 provinsi, 12 Kabupaten/Kota, progress kegiatan masih dalam survey lokasi penanaman. 22 pelatihan masyarakat dari target 10 ribu orang telah dilaksanakan sebanyak 3.670 orang pelatihan klasikal dan 19.533 orang pelatihan *daring*. Dua puluh tiga, pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dilakukan secara *online* atau *daring* dengan memanfaatkan media *online*.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Kami meyakini bahwa sektor kelautan dan perikanan akan menjadi salah satu sector pemenang apabila kita dapat memanfaatkan semua peluang di balik peristiwa pandemi *Covid-19*. Untuk itu, KKP terus berkomitmen untuk selalu hadir bersama seluruh stake holders dalam rangka upaya percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, antara lain dengan mempermudah layanan perijinan usaha perikanan tangkap. Capaian sampai saat ini telah menerbitkan 1.252 SIUP, 2.922 SIPI, 179 SIKPI. KKP juga tidak pernah lengah dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di perairan di Indonesia di mana telah berhasil menangkap 53 kapal ikan ilegal yang memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 ini.

Kinerja ekspor produk perikanan juga menunjukkan kinerja yang membaik ditunjukkan dengan naiknya volume ekspor Januari sampai Mei 2020 sebesar 9,28% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Dan nilai ekspor Januari sampai Mei 2020 juga meningkat 2,24% dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Dalam membantu akses permodalan KKP hadir melalui BLU LPMUKP dengan realisasi penyaluran sebesar Rp462,28 miliar dengan pengembalian pokok pinjaman hingga akhir Mei mencapai Rp107 miliar. Selama pandemi Covid-19, LPMUKP telah menyesuaikan mekanisme layanan sehingga persetujuan pinjaman telah dapat dilakukan di daerah. LPMUKP juga melakukan restrukturisasi pinjaman UMKMKP yang berdampak Covid-19 sebesar Rp39,3 miliar dan terus melakukan evaluasi terhadap mitra debitur LPM UKP selama periode Covid-19. Selain itu, LPMUKP juga memfasilitasi pemasaran produk UMKM debitur PMUKP melalui *Online Mark Place* hingga saat ini terdapat 187 produk yang difasilitasi oleh tenaga pendamping LPMUKP melalui Bukalapak.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Menjawab tentang pertanyaan yang belum kami jawab pada awal tadi, tentang ijin sistem layanan cepat satu jam itu Bapak Ketua semangatnya Bapak Ketua. Karena secara prinsip, secara analisa dan simulasi itu sebenarnya 45 menit bisa Pak Ketua, karena secara *online* mereka itu sudah pernah mengajukan ijin sebelumnya dan sebagainya. Semangat itu dalam pelaksanaannya ada yang memang melebihi dari satu jam. Dan secara online kadang-kadang mendapat keluhan karena susah masuk Bapak Ketua, tapi kami juga selalu laporkan manakala ada hal-hal yang tidak terakomodasi melalui masuknya *online* itu bisa mengajukan secara *offline* dan itu juga kita akan segera fasilitasi. Dan ini terjadi di dua arah Bapak Ketua.

Yang kedua, tentang lobster Pak Ketua, kami sudah sampaikan berkali-kali tentang ijin ini. Semangat kami melakukan ijin ekspor, ijin budi daya lobster karena kita sendiri mengetahui selama ini banyak sekali dengan peraturan yang lama para pelaku usaha, para nelayan yang selama ini hidupnya tergantung oleh penangkapan benih lobster ini yang tadinya ada di budidaya, kemudian ada di ekspor itu kita mau hidupkan kembali apalagi dalam situasi yang seperti ini. Memang kami tidak ingin bersembunyi di balik Covid sehingga semua kebijakan kita gunakan untuk menggunakan kesempatan ini. Karena kebijakan yang kami lakukan ini sebenarnya sudah kita rencanakan jauh sebelum Covid Pak Ketua. Nah, ijin ini adalah ingin memfasilitasi bagaimana masyarakat yang tadinya tergantung hidupnya untuk menangkap dari menangkap benih lobster ini bisa hidup kembali.

Yang kedua Bapak Ketua, dari sisi lingkungan yang dikhawatirkan lobster ini akan punah kalau diambilin. Satu ekor lobster itu bisa bertelur sampai 1 juta dan di daerah yang musimnya 4 yang saat musim panasnya hanya 4 bulan itu bisa sampai 4 kali bertelur Pak Ketua, ini hasil penelitian di Tasmania. Indonesia ini adalah daerah yang banyak mataharinya dan sepanjang tahun musim panas. Memang belum kami teliti apakah bisa sepanjang tahun tapi dengan satu kali yang satu juta saja Bapak Ketua, itu jumlahnya sudah 2 kali dari estimasi yang kami bikin sebelumnya. Tadinya kita menghitung ada 26 miliar total 6 jenis lobster bertelur di Indonesia di 11 WPP Indonesia. Nah, dengan hanya menggunakan kita bagi dua lobster saja itu ada sekitar 26 kali 2/6% muncullah angka di atas 5 miliar. Kalau 10% saja itu 5 juta saja yang kita ijin.

Saya sangat yakin ini tidak, di samping Bapak Ketua, seandainya lobster kita tinggalkan di alam Bapak Ketua, kehidupan di alam itu dia hanya bisa besar 0,02% saja ratenya. Jadi 20 ekor benih lobster ini akan jadi dewasa hanya 1 ekor, sementara kalau di budi daya Bapak Ketua bisa sampai 30% bahkan sampai 80% tergantung konsep budi dayanya dan ini bisa dilakukan secara tradisional. Dan melihat ini semua kepentingan masyarakat yang ada, kepentingan nasional yang ada dan peluang ekonomi yang ada saya pikir kenapa kita tidak membesarkan dengan proses lingkungan. Masalah perusahaan, masalah siapa yang diajak Bapak Ketua, kami tidak membatasi dia harus perusahaan, koperasi boleh, tapi kami tidak bisa menentukan siapa, siapa yang mendaftar kita terima dan terus kita

verifikasi. Sampai hari ini sudah ada 31 perusahaan yang sudah kita verifikasi Bapak Ketua yang diumumkan ada 26 dan kita terus berkembang.

Laut kita terlalu luas, wilayah kita terlalu besar dan sektor ini adalah sektor yang baru salah satu sektor yang saya yakin akan menghasilkan nilai ekonomi. Yang paling penting Bapak Ketua, masyarakat yang tadinya tergantung hidupnya ini hidup kembali. Dari data nelayan sampai puluhan ribu tapi yang kita data tertulis terdaftar baru 10 ribu dan terus meningkat Bapak Ketua. Jadi ini yang terus kita mantangkan.

Yang selanjutnya tentang pelatihan Bapak Ketua, memang dengan kondisi Covid-19 kita sekarang melakukan pelatihan secara *daring*, tapi kita mix Bapak Ketua, dan setiap UPT-UPT menerima semua masukan-masukan apabila mau praktek bisa langsung ke lokasi-lokasi UPT Pelatihan kita Bapak Ketua. Di samping itu konsep pelatihan kami sekarang akan kami perbanyak dengan praktek Bapak Ketua. Saya pikir ini 3 hal yang menjadi catatan Bapak Ketua, nanti mohon ijin arahan, masukan.

Tapi yang jelas Bapak Ketua, masalah temuan BPK Bapak Ketua, kita terus menyempurnakan *Alhamdulillah* kita masuk ke dalam katagori tidak ada temuan, tapi itu akan diputuskan seperti apa hasilnya nanti. Yang jela kekurangan-kekurangan yang ada yang diperintahkan kepada kami dari BPK, kami terus sempurnakan Bapak Ketua, *Insy Allah* kami berdoa semangat untuk pengawasan juga menjadi penting bagi kami.

Saya pikir ini Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seluruh saran, masukan dan rekomendasi Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om shanti-shanti-shanti om,
Namo budaya,
Salam kebajikan.*

Merdeka!!!

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan.

Jadi tadi saudara Menteri mengatakan satu ekor indukan bisa melahirkan 1 juta ekor, kalau tidak percaya nanti Bapak-bapak hitung sendiri

di laut. Sama juga dengan waktu itu programnya Menteri Kehutanan nanam 1 miliar pohon kalau tidak percaya hitung sendiri pohonnya.

Saya mencermati dan ingin dapat informasi langsung perihal pembangunan miamari yang nampaknya sampai hari ini tidak ada progress-nya bahkan yang di Pangandaran infonya dibangun, gedungnya dibangun, tetapi aquariumnya tidak cocok katanya, tidak masuk pas duduk. Ini saya tidak pahan, apa perencanaannya yang asal-asalan atau tendernya yang dari awal bermasalah atau dikerjakan oleh yang tidak professional. Nanti saja dijelaskannya, karena setahu saya ini sudah ada temuan BPK-nya.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapannya, kalau bisa jangan lama-lama nanyanya *to the point* singkat.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Saya persilakan yang pertama Ibu Dr. Hj. Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Bismilahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak Ketua yang saya hormati dan teman-teman Anggota Dewan,
Dan juga Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.

Bapak Menteri, tertarik sekali dengan paparan Bapak Menteri. Jadi kami ingin usulan Bapak Menteri, kebetulan program Gemar Makan Ikan ini sangat disambut terutama oleh para Ibu-Ibu di lingkungan Dapil kami. Nah Untuk itu, kami ingin mengemas bekerja saja dengan Kementerian Pertanian untuk membuat makanan-makanan siap saji dari pakan lokal. Dan itu sudah kami kerjakan di *launching* oleh Walikota Bogor. Nah, mohon diteruskan pelatihan-pelatihannya Bapak Menteri, karena yang saya kerjakan batu satu lokasi.

Kemudian yang kedua, mungkin perlu juga kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, karena kebetulan sekali banyak anak-anak di Kota Bogor dan Cianjur itu problem *stunting*-nya sangat tinggi. Dan makanan-makanan siap saji untuk sekolah-sekolah mungkin bisa bekerja sama dengan Diknas.

Kemudian yang ketiga, untuk pelatihan maggot karena ini baru 0% disini laporannya. Jadi mohon kami bisa diberi fasilitas untuk mengadakan pelatihan-pelatihan membuat maggot. Kemudian yang keempat tentang bantuan mesin dan bahan baku pakan, ini juga menjadikan prioritas kami karena kebetulan sekali pakan yang dari impor sudah merajalela dan

harganya cukup tinggi, padahal masyarakat setempat sudah bisa membuat dari lokal.

Kemudian berikutnya pembangunan *cold storage*. Jadi Cianjur Selatan yang Bapak Menteri kunjungi banyak sekali tangkapan ikan yang berlimpah, namun jalannya sangat berat Bapak Menteri, membutuhkan 6 jam untuk ke Kota Cianjur, sehingga banyak yang mubazir pembusukan ikan di tengah jalan.

Kemudian tadi pelatihan-pelatihan mohon diteruskan terutama di Balitkanwar karena kebetulan Balitkanwar Bogor itu kan letaknya di Sempur Pak, jadi kami bisa bernegosiasi atau bekerja sama dengan Badan Litbang, Balai-balai pasca panen dan rempah obat untuk mengemas makanan-makanan yang siap saji untuk anak-anak sekolah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Ibu Julie.

F-NasDem (JULIE SUTRISNO):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak Menteri dengan jajarannya, para Dirjen.

Ijin kalau saya khusus NTT saja, NTT dikelilingi lautan dan 60% adalah lautan. Saya ingin menitipkan di Bapak Menteri untuk 2 kabupaten yang sudah saya lihat langsung Bupati mereka membuat *grand design* untuk mereka punya program selama mereka menjabat itu grand desain, jadi bukan hanya per tahun program *grand design for the five years*, itu adalah Kabupaten Flores Timur dengan Kabupaten Sikka. Dan saya yakin bahwa kami ikannya tidak kalah dari yang lain, karena contohnya Bapak Bupati Sikka sudah pernah kasih saya *Sashimi* mungkin kelasnya beda dengan Jepang tetapi menuju kesana, tapi perlu dukungan dari pusat. Jadi saya menitipkan dua kabupaten ini untuk bisa bantuan dari Bapak Menteri dari pusat.

Yang berikut adalah karena mengingat saya Ketua PKK Provinsi NTT, saya menanyakan apakah boleh kalau PKK ingin langsung mengajukan ke Kementerian program-program kami untuk bisa difasilitasi, dibantu, karena kami punya orang tenaga tapi kami kurang fasilitas dengan ilmu. Kadang-kadang kami nitip di Dinas tidak diakomodir secara maksimal, kita di PKK mempunyai yang namanya Hatinya PKK dan itu memaksimalkan perkarangan. Jadi salah satu program kami walaupun *scoope*-nya kecil sekarang adalah untuk Gemar Makan Ikan kami sosialisasikan ke desa-desa, karena kami Dasawisma tapikan sebagian kan ada di pesisir, sebagian

tinggalnya adalah di pegunungan. Tapi kan saya tidak mau cuman hanya di pesisir yang makan ikan, kami mau supaya mungkin ada kolam-kolam buatan atau semacam itu yang saya minta untuk bisa rumah ke rumah supaya ada bisa budi daya ikan lalu bisa konsumsi ikan setiap hari.

Yang terakhir, kami PKK juga mempunyai yang namanya kelompok milenial, karena mengingat banyak sekali khususnya NTT banyak yang kembali dari luar negeri dari Covid-19 dan saya ingin supaya milenial ini betah untuk menjadi nelayan di kampungnya dan menjadi UMKM. Jadi saya minta untuk mungkin secara fasilitas dengan ilmu teknologi yang baik supaya mereka tidak lagi keluar negeri.

Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Milenial dan PKK jadi konsennya Ibu Julie ini.

Silakan Bapak Salim, tidak ada ya.

Bapak Azikin.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan seganap Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Bapak Menteri beserta rombongan yang sangat kami hormati.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri yang telah membantu masyarakat Sulawesi Selatan yang terkena Covid-19 dan banjir yang melanda dua kabupaten. Gemar Makan Ikan sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah Covid dan banjir di daerah Kabupaten Bantaeng. Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Menteri, kondisi banjir yang menghancurkan satu pasar ikan di daerah Kabupaten Bantaeng, kami mohon kepada Bapak Menteri kalau memang ada program Bapak Menteri untuk rehabilitasi pasar ikan kami usulkan agar Kabupaten Banteang bisa direhabilitasi pasar ikannya.

Yang kedua Bapak Menteri, di Dapil kami ada daerah Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar ini salah satu kabupaten yang berpotensi mengeksport udang khususnya lobster. Sehubungan dengan hal tersebut kami usulkan kepada Bapak Menteri agar Kabupaten Kepulauan Selayar ini dijadikan sentra pengembangan benih untuk ekspor di daerah Sulawesi Selatan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Darori.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua, para Anggota dan Bapak Menteri dan para Eselon I yang kami hormati.

Pertama, tadi disampaikan oleh Ketua mengenai realisasi keuangan. Saya sebagai Anggota mengapresiasi, dari 85 Kementerian dan Lembaga Kementerian KKP nomor urutnya 33, artinya kalau di sepak bola ini masuk papan atas Bapak Menteri. Hal seperti ini harus terus dipertahankan, mudah-mudahan terus naik sehingga realisasinya lebih baik lagi.

Yang kedua, saya tadi disampaikan oleh Bapak Menteri juga baru membaca di berbagai majalah dan surat kabar. Ini ada hal-hal yang kurang tepat Bapak Ketua, saya mengatakan begini bahwa Kementerian KKP ini dari tahun ke tahun itu meningkat kebaikannya bukan kejelekannya. Tahun 2016 *disclaimer*, 2017 *disclaimer*, artinya apa? Bahwa realisasi keuangan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tahun 2019 tanda tanya, 2020 baik. Ini berarti terus meningkat ya mungkin karena Sekjennya dari Bareskrim atau Irjenya dari Kejaksaan, ini jadi baik ini. Saya kira kalau ini terus seperti ini baik Bapak Ketua kita rekomendasikan kementerian lain seperti ini. Tapi sayangnya Bapak Menteri, saya pernah duduk disitu 38 tahun, saya 10 menteri, ini ada mantan menteri sepertinya belum rela melepaskan jabatannya Pak Menteri.

Saya mohon ini Kementerian Kelautan sudah berbuat baik, memperbaiki temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya, tapi kok yang direcokin lobster misalnya, lobster itu kalau untuk kepentingan rakyat tinggi, karena sewaktu-waktu aturan main berlaku baik kalau seimbangan politik, ekonomi, lingkungan, hukum dan rakyat. Yang lalu rakyat ditinggalkan, masa 6 bulan tidak boleh menangkap lobster mau makan apa. Jadi saya bukan apa, ini kalau seperti ini mau diapakan.

Bapak Ketua, saya juga merekomendasikan tadi kata Bapak Sudin temuan-temuan ini yang dari BPK ya itu banyak yang belum ditindaklanjuti oleh menteri yang lama. Apa kita angkat saja ke pengadilan gitu, saya siap gitu, karena masalahnya sudah cukup rumit seperti tadi yang di Aceh sama Pangandaran itu hanyut. Saya sudah lihat Pak, itu tempatnya sama Aquariumnya tidak sama, mau ditaruh dimana, itu beton. Itu satu.

Yang kedua, sampai Dirjennya dulu mengundurkan diri mengenai operasi Penangkapan Kapal Asing. Penggunaan minyak operasional, Dirjennya mengundurkan diri karena tidak bisa mempertanggungjawabkan. Impor ikan, pengadaan kapal, ini masih masalah. Saya baca laporan BPK, tapi Dirjen sekarang dan Menteri sekarang memperbaiki Bapak Ketua, tapi justru kok seperti ini tidak bersalah.

Jadi saya minta kepada para Dirjen, anda harus loyal kepada pekerjaan bukan loyal kepada Menteri. Kalau anda loyal kepada pekerjaan *Insyah Allah* bisa 10 menteri pun dipakai, tapi kalau loyal kepada Menteri, Menteri gantinya pasti diganti.

Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Slamet, Bapak Dokter Hewan silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Terima kasih atas waktunya.

Beberapa hal yang ingin saya sampaikan di Rapat Kerja hari ini Bapak Menteri. Yang pertama, mengomentari terkait dengan nilai tukar nelayan, bahwa NTN ini sudah menjadi indikator asumsi makro RAPBN tahun 2021, sehingga ini menjadi penting dan tentunya ini menjadi catatan kita bersama bahwa ada keinginan baik untuk kemudian kita mensejahterakan dari nelayan kita.

Saya mengacu kepada target yang telah ditetapkan oleh KKP untuk tahun 2020 itu sekitar 115, sementara sampai semester ini angka yang dirilis oleh statistik itu adalah kira-kira 98. Kira-kira saya ingin mendapatkan gambaran strategi KKP untuk mengejar ini, karena tinggal satu semester sementara serapan juga. Jadi kita ingin mendapatkan gambaran itu kalau di tahun 2020 ini bisa tercapai mudah-mudahan di 2021 juga akan mudah.

Yang kedua, terkait dengan Permen KKP yang baru dikeluarkan yang terkait dengan penangkapan lobster. Saya hanya ingin mendapatkan gambaran bagaimana tingkat pengawasan yang dilakukan oleh ini, karena ya

seperti secara teknis kita ingin mendapatkan gambaran apakah memang mungkin dilakukan pengawasan itu seperti ukurannya, kemudian kondisi tidak bertelur, itu yang ingin kita dapatkan. Dan terkait juga ada catatan-catatan pelanggaran-pelanggaran di budi daya, bagaimana kemudian ketika ada eksportir yang memang melakukan pelanggaran itu. Ini juga perlu dijelaskan.

Dan yang terakhir, tentunya saya juga menanggapi berita yang lagi ramai yang tadi disampaikan oleh Bapak Darori tentang perusahaan-perusahaan yang sekarang banyak beredar yang diberikan ijin. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, tentunya menjadi tugas dan tanggungjawab saya sebagai wakil rakyat yang dipilih mengingatkan kepada Bapak Menteri, bahwa kehadiran Bapak Menteri dan seluruh staf adalah diharapkan menjadi regulator yang baik. Sekali lagi saya mengingatkan sebagai tugas dan fungsi saya sebagai wakil rakyat, harapannya adalah Pemerintah menjadi regulator yang baik sehingga ketika menentukan siapa yang layak mendapatkan ijin atau tidak, tidak ada unsur-unsur yang kemudian pada akhirnya memberikan atau menjadikan proses pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah menjadi lemah sehingga pada ujungnya karena pengawasan lemah dari Pemerintah karena yang perusahaan adalah bagian dari teman-teman kita, maka akan mengorbankan kepentingan rakyat dan juga kepentingan bangsa ini. Jadi disini kami mengingatkan sebagai tugas dan fungsi saya sebagai wakil rakyat.

Itu saja, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Doktor Ansy.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Pak Menteri, Bapak Sekjen dan jajaran yang saya hormati.

Kesempatan pertama Bapak Menteri, saya mau menyampaikan terima kasih Pak Menteri, kemarin Rapat Kerja sebelumnya saya sempat bertanya dan mempersoalkan proses realisasi bantuan yang sulit beberapa hari lalu saya mendapatkan informasi dari lapangan bahwa tim kerja Bapak Menteri itu sudah turun ke tempat saya dan terima kasih. Jadi prosesnya tidak lagi berbelit-belit, saya kira ini patut untuk diapresiasi.

Yang kedua, soal realisasi anggaran KKP Pak, kesimpulannya masih di bawah 50% betul ada di urutan 33 kalau tidak salah, persisnya serapan 43,86% Pak. Saya ingin menyoroti di dua Direktorat Jenderal yang

sebenarnya juga menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo, yaitu Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap. Di dua Ditjen ini serapannya masih ada di bawah 30% Pak, di 28,95% dan Ditjen Perikanan Tangkap sedikit lebih baik di 37%. Pertanyaan saya mengapa serapannya masih ada di bawah sekitar 40% padahal kita tahu bahwa ketika kita bicara nelayan, mayoritas nelayan ada di dua Ditrektorat Jenderal ini, Tangkap maupun Budidaya Pak.

Yang berikut, karena pembatasan sosial ini nelayan kita juga kena dampak Pak. Faktanya sering kita sampaikan tangkapan banyak tetapi distribusinya juga sulit Pak. Saya lansung saja menyampaikan laporan yang saya kutib dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi di awal Juni 2020 Pak, disitu disebutkan ada sekitar 70% nelayan miskin itu belum masuk dalam daftar penerima BLT. Nah, ini kalau kita korelasikan dengan serapan di Direktorat Jenderal Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, artinya nelayan-nelayan kita ini kalau boleh saya simpulkan, mohon maaf ini belum mendapat sesuatu yang optimal. Padahal mereka ini adalah kelompok yang rentan, kelompok miskin dan kita tahu kemiskinan di pesisir itu adalah kemiskinan para nelayan.

Saya juga ingin bertanya soal sinkronisasi data dari KKP, validasi data dan akurasi data. Ini sudah sejauh mana Pak, karena saya kutib tadi laporan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu Pak. Nah, kita berharap kerja dengan data ini bisa menjadi dasar Pak, karena tanpa data kita tidak akan kemana-mana Pak.

Yang berikut, kesempatan ini saya juga mau menagih janji Pak, kali lalu Bapak menjanjikan kepada saya kajian akademis soal benur itu, soal lobster itu, sehingga kemudian saya juga bisa memberikan catatan berdasarkan kajian KKP Pak. Sebelum ada kajian itu saya juga belum bisa memberikan komentar apa-apa terkait dengan isu ini.

Terakhir Pak, soal garam saya melihat serapan dan realisasinya itu masih sangat rendah ada di angka sekitar Rp5,24 miliar tidak rendah juga karena memang anggarannya rendah, anggarannya tidak terlalu besar. Tetapi garam rakyat inikan kalau seandainya bisa terserap prosentasenya lebih besar Pak, ini akan sangat membantu masyarakat kita. Khusus untuk NTT Pak, itu ada saya bisa sebut di 3 Kabupaten kalau tidak salah di Kabupaten Malaka itu Kovadis itu Pak, itu arahnya kemana garam itu disana. Mohon dicek dan kemudian bisa diberikan penjelasan kepada kami. Yang kedua potensi garam di Polo di Kabupaten Kupang beberapa kali kita juga sudah omong soal itu Pak. Dan juga saya baru kemarin mendapatkan informasi ada di Flores di Nagekeo Pak.

Nah, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Termasuk potensi garam di kepulauan lain, kan itu kan tidak hanya NTT biar merah putih.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Setuju Pak Kyai.

KETUA RAPATT:

Alhamdulillah.

Ibu Farida silakan.

F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Wakil Pimpinan yang saya hormati,
Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya.

Terkait dengan program APBN yang serapan di tahun 2020 ini hampir APBN KKP berada di urutan 38 dengan prosentase 38,19% seperti yang disampaikan oleh rekan saya Pak Ansi Lema. Realisasi terendah ada di Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya. Maka saya ingin tanyakan adalah hambatan apa yang terkait dengan Direktorat Jenderal Budidaya terkait dengan penyerapan anggaran supaya bisa maksimal terserap di Direktorat Jenderal Budidaya Ikan ini. Terus bagaimana upaya dan strategi KKP untuk meningkatkan realisasi pencapaian target terkait pandemi Covid ini.

Terus yang kedua, kami sangat mengapresiasi terkait dengan program-program pembudidaya ikan di tahun 2020 di Bulan Desember stimulusnya sangat luar biasa sekali, tetapi Covid inikan dampaknya sangat panjang. Nah, ini apa sudah direncanakan terkait dengan stimulus-stimulus kedepan untuk jangka panjang terkait dengan pembudidaya ikan ini.

Terus pertanyaan yang terakhir, mencermati laporan perkembangan terkait dengan Silat. Hampir kalau saya lihat di data ini 125 38,8% dari jumlah alokasi SIUP ini 75% adalah dari Provinsi di luar Pulau Jawa. Berarti artinya 25% inikan tidak diserap di luar Pulau Jawa. Ijinnya tidak terbit di luar Pulau Jawa. Mohon penjelasan apakah kendala atau hambatan terkait pertimbangan atau khusus di Provinsi di luar Pulau Jawa. Jadi yang kenapa ijinnya seperti berbelit-belit atau mungkin barangkali ada pertimbangan khusus seperti itu Bapak Menteri, mungkin itu pertanyaan dari saya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya silakan dari nelayan ini, bosnya nelayan Bapak Abdullah Tuasikal dari NasDem.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak Menteri, Bapak Sekjen beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri, saya kira Maluku, Maluku Utara, Papua dan Nusa Tenggara juga tidak kalah jauh dengan wilayah-wilayah lain yang sekarang lagi digarap potensinya, lobster, garam dan lain-lain. Saya kira potensi yang ada ini kita harapkan agar benar-benar adalah perhatian dari Bapak Menteri. Karena apapun juga ikan adalah komoditas yang sangat cukup besar, kita punya wilayah yang memiliki potensi tapi saya belum melihat peran kerja Kementerian kira-kira Maluku, Maluku Utara, Papua itu mau dibangun seperti apa?, Ini yang pertama.

Yang kedua, kondisi virus ini mengakibatkan masyarakat kita di sana tidak bisa melaut atau tidak bisa berbuat apa-apa soal nelayan, karena dibatasi apalagi di Ambon sekarang ini sudah diterapkan PSBB. Gemar ikan saya kira satu hal yang sangat cukup penting, tapi kalau kita itu Gemar Ikan itu merupakan satu stimulan, karena kita di Maluku kalau ikan ini tidak ada yang lain kecuali makan ikan. Harapan kita Bapak Menteri, ada program yang bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sana yang bisa menyelamatkan masyarakat yang ada di sana. Karena apa? Potensi ikan yang ada disana kalau pada musimnya ikan sampai terbuang. Dan kalau tidak ada musim mungkin ikan termahal di Maluku. Tadinya bisa 4 ribu, 5 ribu, 6 ribu tapi bisa sampai 20 ribu. Waktu Rapat Dengar Pendapat kalau tidak salah bulan April yang lalu saya harapkan agar BUMN yang ditugaskan di Ambon untuk menangani minimal masalah penampungan ikan. Saya lihat BUMN yang ada disana juga tidak bisa buat apa-apa, bisa hanya potensi ikan disana tidak mampu yang ditampung oleh BUMN bahkan kadangkala BUMN yang ada disana ini alasannya finansial. Saya harapkan kalau untuk domain yang ada di Maluku ini kita harus minimal melihat kembali mampu atau tidak, yang kedua ada untung atau ada rugi. Kalau dari amatan saya beberapa bulan disana saya kira BUMN itu pasti rugi, kalau rugi ya kita bantu, kalau memang tidak bisa ya kita ganti dengan BUMN yang lain. Agar kita tidak korbarkan masyarakat nelayan yang ada di Maluku.

Yang terakhir Bapak Menteri, saya kira perlu ada penampungan *cold storage* dan lain-lain karena kalau tidak ada itu maka ikannya terbuang. Kita belum lihat masalah harga tetapi ikannya pasti terbuang. Untuk itu, dengan

adanya kondisi yang ada sekarang memang terasa, masyarakat Maluku terasa, ikan yang begitu potensi itu hanya mereka malas, karena apa? Harganya rendah, bahkan dengan semua jalur tertutup transportasi, kadangkala ada juga kapal, kapal angkut dari Jawa, Surabaya ke Maluku itu juga hampir tidak pernah ada.

Saya kira demikian singkat saja, Bapak Menteri yang penting saya BUMN yang ada disana tolong diperhatikan, dibantu modal kalau tidak ada ini akan repot. Saya pernah juga dengan teman-teman disana, ini harus mutar kiri dan kanan dulu. Saya minta itu Bapak Menteri untuk perhatian.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu sekalian.

Mohon agak singkat, karena Bapak Menteri jam 13.00 WIB ada Ratas. Sehingga mungkin 1,5 menit cukup.

Silakan Teuku Salim tanpa teks coba, kalau tanpa teks cepat.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang terhormat Bapak Menteri dan jajarannya.

Saya langsung saja Pak, pertama Bapak Menteri hasil Kunjungan Kerja kami ke Dapil. Ada satu pelabuhan di Aceh Selatan, pelabuhan perikanan namanya Desa Pelabuhan Lauk Pauk di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Disitu ada 2 ribu nelayan yang menggantungkan kehidupannya dari perikanan. Saya kira singkatnya Bapak Menteri, mohon perhatian dari Kementerian masalah pelabuhan tersebut, karena sudah tidak layak Bapak Menteri. Ada 2 ribu itu nelayan yang ada disitu.

Yang kedua, bantuan untuk nelayan Aceh ada usul-usulan seperti *Fish Finder*, Alat Tangkap, Lentara Tenaga Surya Bapak Sekjen, sangat diperlukan. Saya kira seluruh Indonesia perlu cuman saya berbicara Dapil, sudah itu Jaring, termasuk Pancing. Yang ketiga, khusus di Kabupaten daerah saya Kabupaten Aceh Tenggara hanya perikanan darat Bapak Menteri. Mohon kiranya bantuan Bapak Menteri, Bapak Slamet sudah paham betul apa-apa yang bisa bantuan khususnya Kabupaten Aceh Tenggara karena penghasil ikan mas. Disana pakan, pellet, termasuk bibit-bibit ikan yang menurut standar yang sangat-sangat diperlukan di samping fasilitas lainnya.

Saya kira begitu saja Bapak Hasan saya hari ini tidak apa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah.

Selanjutnya Bapak Mindo Sianipar.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Terima kasih Ketua.

Tidak ada pertanyaan, hanya beberapa poin-poin yang saya harapkan menjadi perhatian. Bapak Edhy Prabowo Bapak Menteri, dalam mengerjakan Gemar Makan Ikan itu jangan diasumsikan itu untuk mengatasi *stunting* supaya tahu masyarakat supaya menaikkan protein, supaya tahu masyarakat. Masyarakat itu tahu kalau makan ikan lebih baik, persoalannya duitnya tidak ada. Jadi biar anggaran kita ini lebih fokus mau kemana kita buat. Itu satu menjadi catatan. Kalau dulu didukung oleh Bapak, waktu Bapak jadi Ketua Komisi bersama-sama kita disini. Itu masa-masa kampanye Pak, jadi Gemar Makan Ikan ngumpul ya senang Anggota Dewan, kumpul banyak orang. Jadi sedikit diingatkan kembali, kira-kira begitu.

Yang kedua, maggot ini dia hanya berhasil Pak, kalau Bapak bersama Menteri BUMN memastikan, sekali lagi memastikan setidaknya 30% bungkil kernel *oil*, bungkil kernel inti sawit dijual kepada usaha kecil bukan kepada konglomerat, bukan kepada perusahaan-perusahaan pakan ternak yang besar itu. Karena dalam pengembangannya dia perlu isolasi, dia perlu menggunakan kernel *oil* dari jadi sewaktu dia bertelur itu lalat lain tidak masuk, lalat ijo tidak masuk, kalau dicampur yang lain lalat ijo masuk, lalat ijo pembawa petaka, gagal nanti pembudidayanya. Jadi dibutuhkan itu setidaknya untuk menghasilkan baby maggot, setelah *baby* maggot masukkan ke sampah organik dia bisa besar, besar itu untuk pakan. Kalau dimasukkan kembali ke higienis itu bukan untuk pakan, itu untuk pangan, seperti yang di Bogor sana itu, itu untuk pangan Pak, di ekspor ke Belanda. Maggot ini bagus sekali, saya kira tapi harus BUMN. Pastikan itu dapat minimum 30%, bagaimana caranya, bagaimana melihat mereka menjual ke usaha kecil itu, itu perhatikan dengan baik.

Yang ketiga, untuk budi daya dari dulu saya cenderung budi daya. Salah satu soal faname, coba ingat baik-baik dulu faname ini mau kita subsidi, mau kita kasih makan siapa, mau ekspor? jangan. Subsidi kita itu jangan kita buat untuk bersaingnya perusahaan besar untuk ekspor, bukan itu uang rakyat ini. Tetapi uang rakyat digunakan supaya makin banyak rakyat yang mempunyai daya beli yang mampu membeli ikan agar nutrisinya lebih baik. Jadi arahnya lagi-lagi kalau mau subsidi itu yang banyak dimakan rakyat di dalam negeri bukan untuk ekspor. Bukan supaya daya saingnya perusahaan, perusahaan sudah bisa cara pikir sendiri, tidak perlu subsidi APBN untuk sana. Itu harus menjadi catatan soal faname itu. Dari jamannya Pak Direktur Jenderal Bapak Made Nurjanah, jamannya Bapak Menteri yang Angkatan Laut itu saya tolak itu, itu tidak bagus.

Yang keempat, dalam rangka budi daya ini. Pak Menteri, Bapak Slamet, coba di inventarisasi supaya Bapak-bapak tidak memberikan benih kemana-mana ke rakyat akan tetapi sesungguhnya itu jadi *captive market* bagi perusahaan pakan. Makin banyak benih lele yang Bapak berikan, makin banyak bibit patin diberikan, itu yang untung itu *Charoend phokphand* Pak, *Jamfa Comfeed* karena pakan dari dia. Sudah terbiasa pula kasih pakan ini harus yang terapung. Bapak-bapak yang bagikan pakan mandiri itu tidak ada yang terapung itu. Busuk punya itu, karena tidak tertib orang memberikan. Lebih dari makannya dia turun ke dasar terjadi pembusukan, timbul amoniak, kecuali diberikan mikrobial tertentu untuk mengatasinya. Saya sarankan Bapak Slamet, di masyarakat untuk ikan gurame misalnya itu ada 5 jenjang transaksinya, dipikirkan dengan baik itu. Sehingga yang diberikan subsidi bibit-bibit ikan itu adalah bibit ikan yang pakannya bisa disediakan oleh rakyat. Bisa disediakan oleh petani; Gurame, Nila, Ikan Bawal Air Tawar itu pemakan segala.

Yang terakhir, soal *cold storage*. Ini soal masalah *cold chain*, kita inikan terpengaruh terhadap *cold chain* ya, mana Ibu NTT tadi, mana tadi mereka yang mengatakan. Susahnya menjual ikan, kan begitu kan. PT Garam ada disini ya, saudara-saudara PT Garam pikirkan baik-baik bagaimana mengawinkan antara teknologi *Sodium Hypochlorite* yang berbasis air laut sebagai desinfektan untuk nelayan. Mengapa sih bisa busuk ikan itu? Busuk ikan itu ada dua, satu dari mikrobial yang ada di dalam dirinya, di dalam perut dan insang, pada temperature tertentu dia berkembang, kalau dikasih formalin mati, itu jahatnya orang-orang, nah kita jangan kasih formalin, gila kita negara kalau formalin. Nah, desinfektan pada prosentase tertentu itu murah alatnya, alat untuk electro chlor itu tidak mahal. Itu yang satu,

Yang kedua, teman-teman dari KKP kembangkanlah ikan segar kering tanpa garam. Sekali lagi ikan segar kering tanpa garam, tadi Maluku tadi inginnya kasih uang, mikir lebih serius kita, tidak ada uang negara bagi-bagi begitu, tidak ada uang negara juga mau bagi semua tempat dengan *cold storage*. Tetapi kalau dikeringkan harga murah katakanlah kadarnya, kadar air di bawah 14% dikumpulkan di Maluku, dikumpulkan di Flores ikan laut segar tetapi kering itu sebanyak-banyaknya akan diserap masyarakat di Pulau Jawa. Nanti di Probolinggo temannya Kyai Hasan menyebut tempe akan tetap tempe, sekarang ini kalau ditanya “opo iwak’e? iwak tempe” sudah jadi iwak dia ya.

Terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Edhy, nampaknya Bapak Mindo ini bisa dijadikan staf khusus dan staf ahli. Bukan staf khusus, tapi staf khusus dan staf ahli lebih cocok tampaknya.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Kalau di Jombang ustad beliau, karena semenjak reformasi tidak pernah berpindah hati pemilihnya.

Selanjutnya silakan Ustad H. Ahmad Ali.

F-NasDem (AHMAD HI M. ALI, S.E.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi menjelang siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak Menteri KKP dan jajarannya yang saya hormati,
Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang saya muliakan.

Alhamdulillah, ini baru pertama kali saya bicara di Komisi IV DPR RI Pak Menteri. Jadi setelah saya ditugaskan oleh Bapak Hasan Aminuddin di Komisi IV DPR RI baru kali ini saya kemudian dikasih kesempatan untuk berbicara. Jadi begini, akhir-akhir ini kita banyak disibukkan dengan polemik pemberitaan yang kemudian tentang kebijakan daripada Kementerian KKP. Nah, Fraksi NasDem kebetulan saya Ketua Fraksi Bapak Edhy, jadi saya ingin mengatakan bahwa semua kebijakan-kebijakan dari KKP terutama yang hari ini sedang ramai dibicarakan tentang ekspor lobster dan lain-lain itu didukung oleh Fraksi NasDem tentang ekspor lobster. Sebenarnya saya melihat bahwa alam itu punya keseimbangan sendiri, biarlah alam menemukan titik keseimbangannya sendiri.

Terus kemudian yang mungkin perlu diperbaiki oleh Kementerian KKP adalah narasi, narasinya sehingga kemudian tidak terkesan diluar bahwa kebijakan ekspor lobster ini hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu, kepentingan Gerindra dan orang-orang yang punya kepentingan, hanya itu sebenarnya pointnya. Ini yang kemudian narasinya tolong di KKP diperbaiki.

Terus kemudian jangan menari di atas panggung mantan Menteri KKP deh. Jadi tidak perlu berkonfrontasi dengan Menteri KKP yang lama. Pak Edhy, akhirnya kebijakan ini bahwa ini untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, jalan tanpa perlu memperdulikan apa yang kemudian narasi-narasi yang ada diluar. *Insya Allah* ini akan bagus, karena sepanjang kemudian yang kita hindari adalah ketika kemudian eksploitasi lobster ini menggunakan peralatan yang bisa memusnahkan indukan dan benih-benih lain saya pikir itu kita akan hindari. Tapi sepanjang kemudian ini dibudi dayakan dan kemudian diekspor untuk kepentingan masyarakat, saya pikir ini semua orang akan mendukung ini, cuman kemudian narasi yang diperbaiki.

Terus yang kedua, mengenai hal kebetulan tadi teman-teman banyak bicara tentang kondisi Dapil dari daerah. Saya juga dari kampung Bapak Edhy, tapi kemudian hari ini bahwa kita ada disini tentunya kita tidak bicara tentang kepentingan Dapil kita tetapi kita bicara tentang perikanan secara nasional. Bahwa Indonesia yang kemudian sebagian besar wilayahnya adalah pesisir, tentunya maka kemudian kebijakan KKP ini sangat ditunggu. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan nelayan-nelayan kecil di daerah. Tentang ketersediaan bahan bakar yang terjangkau di pulau-pulau itu jadi kemarin waktu saya di Komisi VII DPR RI itu ada program Kementerian satu harga, yaitu tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa nelayan-nelayan kecil itu memperoleh fasilitas dari negara tentang ketersediaan bahan bakar dengan harga mampu terjangkau karena kalau tidak problem mereka di daerah itu harga bahan bakar bukan hanya di Papua yang mahal harga bahan bakarnya, di kepulauan Una-Una, Patogean, itu bahan bakarnya kalau tidak dikontrol negara itu akan sulit dijangkau oleh para nelayan, sehingga kemudian kita harapkan negara hadir untuk memastikan itu.

Nelayan itu tidak perlu diajarkan untuk berenang, mereka tahu sama dengan orang Bajo tidak perlu diajarkan untuk berenang, sama petani tidak usah diajarkan untuk mencangkul. Hanya mereka butuh difasilitasi oleh negara untuk kemudian mereka memastikan bahwa mereka sebagai nelayan bisa *survive* dengan kehidupannya, itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian para nelayan kita selama ini tidak *survive*? Karena mereka pada akhirnya menggunakan pekerjaan profesi nelayan itu hanya untuk bertahan hidup. Di Indonesia ini, di laut Indonesia ini para nelayan mengail satu jam untuk kebutuhan makannya dia cukup dan mereka tidak pernah berpikir untuk lebih jauh, kenapa? Karena ketika mereka mendapatkan hasil lebih banyak, lebih banyak kemudian tidak bisa punya nilai ekonomi, karena pasarnya tidak tersedia dan *cold storage* tidak tersedia. Ketika pasar tidak tersedia saat mereka pulang dari laut, maka kemudian dia harus difasilitasi, negara harus hadir untuk memfasilitasi mereka menyiapkan dan membangun *cold storage*, mencarikan Bapak angkat buat mereka. Saya pikir kebijakan-kebijakan ini yang perlu ditingkatkan, daripada kemudian kita terjebak dengan hal-hal yang kemudian pada akhirnya menghabiskan energi. Bangsa ini sudah terlalu banyak membuang-buang energi yang tidak produktif. Kita kemudian berdebat dengan hal-hal yang kemudian pada akhirnya melelahkan masyarakat.

Nah, saya pikir Kementerian KKP sekali lagi saran saya untuk kemudian fokus tidak usah terjebak dengan provokasi-provokasi yang ada diluar. Kalau Bahasa sederhana saya selalu mengatakan kalau anda tidak setuju dengan program hari ini, nanti kamu lagi Menteri KKP baru kamu bikin kegiatan yang menurut kau bagus. Hari ini Edhy Prabowo jadi Menteri KKP dia meyakini program ini bisa mensejahterakan masyarakat, iijinkan dia untuk melaksanakan program ini sampai selesai.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mantap dukungan NasDem.

Silakan Ibu Hj. Renny.

Silakan Ustad Haerudin Fraksi Partai Amanat Nasional yang sudah akan berkoalisi.

Silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Ketua, Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat, Bapak Menteri KKP Bapak Edhy Prabowo beserta seluruh jajaran Eselon I, Eselon II yang hadir pada hari ini yang saya hormati.

Ada beberapa hal ingin kami sampaikan, terima kasih atas kesempatan Bapak Ketua. Tentu nelayan kita adalah yang stigmanya nelayan kita itu adalah ruangnya kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Nelayan kita memang sudah dimoderinisasi tetapi tentu kebijakan kita harus lebih adaptatif dan lebih perhatian dalam menghadapi psikologis nelayan kita. Tentu dalam konteks sosiologis nelayan di Indonesia dimodernisasi seperti Eropa bukan hal yang gampang, akan mahal harganya tetapi sedikit hasilnya. Potensi yang ada lebih baik dimaksimalkan yang ada dilapangan tentu anggarannya juga tidak akan terlalu besar seperti yang selalu kita dengung-dengungkan memodernisasi nelayan tempo dulu.

Ingin kami sampaikan beberapa hal Bapak Menteri, bahwa kebijakan kemarin membeli ikan pada nelayan dan kita bagikan lagi kepada nelayan adalah baik. Tapi tentu hari ini adalah bagaimana harga nelayan ini kita ikut dorong bersama-sama mereka naik harganya. Mereka sudah mulai turun, sudah mulai berpenghasilan dan bagaimana mereka punya jaminan harga, itu harus dipikirkan baik-baik oleh kita.

Yang kedua, kalau dari sisi bagaimana nelayan ini hidup baik di tangkap, di budi daya, tentu kita dulu Kementerian KKP tahun 2015 ada Permen Nomor 2 candrang dan lobster yang kita ribut berkepanjangan sampai tidak ada berhenti ujungnya adalah pos-pos di kementerian, 100 pos di kementerian kosong yang akhirnya menyebabkan kinerja buruk. Saya khawatir kinerja hari ini kita tidak maksimum hanya peringkat 33 adalah tidak efektifnya barisan yang ada, tidak efektifnya pos-pos yang kemarin kosong yang hari ini diisi sebagian atau belum maksimal.

Yang kedua Bapak Menteri, dari sisi teknis di program kita kenapa belum mencapai masih di peringkat 33 atau masih 43%. Mungkin banyak peraturan yang harus kita sederhanakan, tidak berbelit-belit lagi. Jadi jangan sampai ada tindakan Bapak Menteri, ada kebijakan Bapak Menteri justru

berhadap-hadapan dengan peraturan yang sudah ada. Nah, bagaimana caranya?, direvisi semua, kalau revisi Permen ya harus direvisi sama Permen. Dulu contoh Permen Larangan Cantrang itu Ombudsman pernah memberikan teguran minta 2 tahun tidak boleh dilaksanakan untuk memberikan ruang kebijaksanaan para nelayan. Kalau hal ini dihitung bahwa ini adalah menurunkan kemampuan kita bagaimana cantrang bisa dipakai tapi tidak merusak, dipikirkan kalau kata Bapak Mindo. Untuk itu, tentu banyak hal yang harus kita justru diperbaiki yang bisa memberikan ruang kepada nelayan kita lebih baik kedepannya.

Terakhir tentu ini tanggapan saya Pak Menteri tentang garam, PT Garam ini yang hadir Direktur Operasional terus, apa Bapak Dirut sekarang. Suatu saat Bapak Dirut lah yang hadir, masa Rapat Kerja diwakili.

KETUA RAPAT:

Ada itu virtual Bapak Dirut.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Oke, kami ingin sampaikan pertama kepada Bapak Menteri, PT Garam maksimal potensi garam kita. Syukur-syukur kita bisa ekspor, mudah-mudahan ke depan justru kita berjaya di segalanya. Jadi kalau ada jaya di lautan, jaya di daratan, garam keren, ikan keren. Nah, itulah yang kita mantapkan Bapak Menteri.

Terima kasih Bapak Menteri,

Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Bapak Doktor Hermanto, 3 menit cukup.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Yang lain tidak disebut 3 menit, giliran saya dibatasin, diskriminatif.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Ketua.

Pimpinan, Anggota dan Bapak Menteri bersama jajarannya.

Pertama, saya menyampaikan apresiasi program yang berkaitan dengan soal Gemar Ikan, Bulan Karantina dan sebagainya itu. Ini sebenarnya sudah menumbuhkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Saya pernah wawancara pada penerima untuk daerah-daerah yang alokasinya di Sumatera Barat, mereka sangat menyambutnya dan bahkan sangat responsive sekali terhadap apa yang disalurkan. Dan bahkan mengatakan kalau bisa ditambah ya tambah lagi.

Itukan cuman hanya baru sekali dalam itupun masa pandemic. Nah, oleh karena itu Gemar Ikan dan segala macam yang kaitan dengan mengkonsumsi itu sekarang sudah tumbuh dengan baik Bapak Menteri dan Bapak Dirjen semuanya. Nah, menurut saya ini perlu ditindaklanjuti dengan meningkatkan produktifitas ikan kita sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Jadi harus ada ini juga kalau di darat itu di daerah pegunungan kan dia ikan itu adalah ikan budi daya, beda dengan daerah pantai dia kan laut. Nah, ini perlu ada pertukaran antara konsumsi yang ikan darat dan ikan laut sehingga ada pemerataan. Saya pikir ini perlu ada satu strategi sendiri oleh Kementerian untuk supaya terjadi pemerataan dari segi mengkonsumsi dari berbagai jenis-jenis ikan yang dikonsumsi. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya sebenarnya terkait dengan soal kebijakan lobster. Inikan sebenarnya kan kembali lagi kepada keseimbangan alam kita, bahwa lobster itu adalah hidup dan tumbuh berkembang di laut Indonesia ini sepanjang dia memiliki suatu keseimbangan dan kemudian juga terjamin kontinuitas daripada lobster itu dan kemudian disitu ada potensi ekonomi yang bisa diambil manfaatnya untuk kebutuhan dalam negeri ataupun juga untuk kebutuhan ekspor. Saya pikir ini adalah sangat bagus kalau kita misalnya mengaturnya secara baik. Nah, tentunya di dalam hal kaitan dengan pemanfaatan potensi ekonominya tentunya harus ada prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan bagi para pelaku. Dan ini adalah bagian daripada kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat. Jadi kalau misalnya lobster ini tumbuh berkembang lalu tidak ada kita ambil manfaatnya ini berarti kerugian buat bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu kebijakan ekspor itu harus ada memperhatikan keseimbangan dari pertumbuhan dan perkembangan lobster ini. Saya pikir itu sah-sah saja.

Kemudian yang ketiga, di Sumatera Barat di Pantai Padang Pariaman itu Bapak Menteri itu sudah tumbuh berkembang tambak-tambak udang. Nah, saya belum dapat informasi pemetaan daripada tambak-tambak udang ini seperti apa, karena disitu juga ada efek lingkungan juga. Bahwa selama ini masyarakat itu adalah terlindung dengan pohon-pohon kelapa dan lain sebagainya itu, sekarang itu terbuka akhirnya hempasan-hempasan angin dan ombak itu langsung masuk ke rumah warga atau penduduk. Jadi tambak itu betul-betul beririsn dengan pantai dan perkampungan masyarakat. Saya pikir ini pihak Kementerian ini perlu mempertimbangkan aspek lingkungannya disana.

Kemudian yang terakhir yang keempat, pada periode yang lalu kita pernah mengunjungi Mentawai dan itu ada bantuan 15 kapal dari kementerian dan itu sekarang ini persoalannya adalah kapal itu belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Lantaran apa? Karena disitu masyarakat ada semacam SBPU untuk nelayan, itu sampai sekarang tidak berfungsi. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan soal *cold storage*-nya, *cold storage*-nya juga sudah perlu ada. Karena disitu ada pabrik es tapi pabrik esnya itu tidak bisa bertahan lama untuk misalnya kalau dia sudah jadi es. Jadi masyarakat di sana, nelayan di sana minta supaya pertama ada perbaikan SPBU untuk nelayan, kemudian juga perbaikan *cold storage*. Dua itu tuntutan masyarakat. Dan yang ketiga adalah bagaimana kapal-kapal yang 15 itu bisa dioptimalkan.

Demikian Bapak Menteri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sudah belajar bijak 2,5 menit.

H. Charles Meikyansah.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera.

Bapak Menteri, Bapak Sekjen dan Dirjen, serta rekan-rekan dari Komisi IV DPR RI.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri atas kinerja serapan anggaran yang menurut saya dengan 43,86% sampai 3 Juli 2020 ini, ini sebuah hal yang sangat baik dan kami berharap dalam sisa-sisa bulan ini dapat terus diefektifkan oleh Bapak dengan jajarannya. Kemudian tadi saya juga menyikapi program Gemar Ikan ini. Saya kira di suasana Covid hari ini jelas sangat memberikan dampak yang sangat baik kemudian masyarakat. Saya kemarin waktu Kundapil terakhir tidak hanya ke Dapil saya di Jember dan Lumajang tetapi juga menyusuri pantai utara Jawa Timur mereka sepakat dan punya harapan banyak dengan Bapak Menteri untuk program-program yang semacam ini. Jadi saya berharap program-program yang semacam ini akan terus berlanjut.

Yang kedua Bapak Menteri, soal asuransi usaha budi daya Bapak Menteri. Saya melihat anggaran untuk program ini masih sangat minim Bapak

Menteri, baru sekitar 93,98 juta dari pagu anggaran 3,5 miliar. Yang ingin saya tanyakan apa yang menyebabkan lambatnya program realisasi program asuransi budi daya ikan ini. Bagaimana jika mengajukan asuransi budi daya mencapai batas pagu anggaran ini. Saya berharap ini harus ada percepatan yang harus dilakukan oleh Bapak Menteri agar dalam waktu yang tidak beberapa bulan ini, ini pencapaiannya lebih besar karena kita bicara untuk 30 Provinsi di Indonesia.

Yang terakhir, ini yang terkait dengan yang tadi disampaikan Bapak Menteri, soal ekspor benih lobster. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi kami yang juga Anggota Komisi IV DPR RI bahwa NasDem mendukung program ekspor dari lobster ini. Namun, dari beberapa hal itu ada beberapa catatan penting kami. Kalau bicara tentang ekspor kami juga ingin melihat ada budi daya yang coba Bapak Menteri sampaikan kepada kami disini karena tadi saya belum menangkap optimisme dari Bapak Menteri yang menyatakan bahwa membudidayakan ini memang cukup sulit Pak. Saya berharap itu menjadi sebuah program yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Bapak Menteri kedepan. Jadi tidak sekedar ekspor dari lobster saja tapi juga bagaimana budi daya lobster ini bisa maju Bapak Menteri.

Kemudian saya banyak pertanyaan dari masyarakat dan juga yang seperti kita ketahui di media tentang 25 perusahaan eksportir benih lobster ini Bapak Menteri. Saya menyatakan bahwa saya punya keyakinan bahwa Bapak Menteri bukan hanya bicara tentang golongan dan tertentu saja, tapi saya yakin kalau dari sikap Bapak Menteri ini bahwa siapa pun bisa berusaha di bidang lobster ini. Dan ini yang harus kemudian Bapak Menteri memberikan keyakinan kepada publik bahwa ini bukan sekedar sedang menyenangkan satu kelompok tertentu saja. Saya berharap kalau tadi Bapak Ali menyatakan narasinya yang perlu dibangun saya melihat Bapak Menteri juga perlu menyampaikan kemudian publik bahwa soal lobster ini adalah keberpihakan kementerian kemudian rakyat dalam hal ini nelayan yang menurut saya dalam 5 tahun terakhir kemarin lebih banyak dapat pujian buat orang-orang tertentu tapi buat mereka dilapangan khususnya nelayan tidak mendapatkan apapun Bapak Menteri.

Jadi saya berharap Menteri KKP yang sekarang ini boleh tidak terlalu populer tapi masyarakat khususnya nelayan adalah masyarakat yang diutamakan terutama dari sisi kesejahteraan Pak. Jadi mereka sekarang berharap sekali, saya tanya sekali lagi di Pantai Utara itu apa harapan mereka terhadap seorang Menteri KKP yang baru. Mereka pikir adalah mereka minta kesejahteraan.

Saya pikir itu Bapak Ketua, Pimpinan yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi dukungan untuk ekspor lobster ini menjadi salah satu poin penting pada pertemuan pada hari ini.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Ibu Renny silakan Ibu.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.PN.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua Komisi, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang saya hormati Bapak Menteri KKP Bapak Edhy Prabowo.

Saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya disini menggantikan Bapak, kalau Bapak tidak diangkat jadi Menteri saya tidak ada disini Pak, berkah buat saya Pak.

Bapak Menteri yang saya hormati.

Sebelumnya saya apresiasi terhadap keberhasilan realisasi KKP yang telah berhasil menduduki peringkat 38 dari 85 kementerian. Dari hasil paparan Bapak tadi ada satu hal yang menarik buat saya mengenai budidaya maggot Pak. Maggot atau larva yang hidup dari bungkil kelapa sawit, kita tahu maggot ini sebagai bahan baku alternatif untuk pembuatan pakan ikan yang memang banyak mengandung protein tinggi dan berkualitas yang dibutuhkan oleh ikan.

Dari data KKP bahwa percontohan budi daya maggot ini akan dilaksanakan di Jepara. Ini yang menarik buat saya Pak, saya ingin tahu Pak, karena di Dapil kita pak, Sumatera Selatan inikan banyak sekali tanaman sawit. Dari data ini saya ingin bertanya Pak, apa alasan dipilihnya Jepara menjadi tempat lokasi percontohan budi daya maggot ini. Padahal Jepara ini bukan sentra tanaman sawit, kenapa tidak dilaksanakan di Pulau Sumatera saja yang memang banyak sekali tanaman sawitnya Pak. Itu saja yang saya ingin tahu alasannya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Bisa saya tambahkan sedikit Ibu Renny, ini ada masa lalunya, masa lalu 2010, 2011 maggot itu percobaannya di Sumsel tapi gagal. Ini sekedar informasi saja karena waktu itu saya langsung ke lapangan. Ya mungkin pertimbangannya kenapa di Jepara, ya saya tidak tahu. Tapi yang pasti di Sumatera Selatan itu gagal.

KETUA RAPAT:

Ibu Kiki, karena Ibu Ema tidak ada. Oh, ada Ibu Ema, Ibu Ema dulu sesuai dengan nomor urut.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan beserta Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang luar biasa dan semoga kita pada pagi hari ini diberikan sehat wal'afiat, aamiin. Bapak Menteri KKP beserta jajarannya yang hadir.

Ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, terkait dengan program bantuan benih indukan bioflok dan pakan ini mungkin ada yang sudah realisasi tapi ada yang belum sama sekali termasuk bioflok. Di Dapil kami, kami memang belum sama sekali untuk realisasi. Aspirasi oleh masyarakat di Dapil (Daerah Pemilihan) sudah banyak menanyakan terkait dengan hal tersebut. Untuk program Minapadi kami menilai program ini sangat cocok untuk mendorong penguatan pangan pada masa pandemi. Kami berharap kedepan program ini ditingkatkan dengan catatan dipermudah aturan dan regulasi agar mudah terserap.

Yang kedua, terkait evaluasi kegiatan Bulan Mutu Karantina. Alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan Covid-19 terbatas atau 105 bantuan paket produk perikanan. Namun, dalam teknis pelaksanaan mengapa Badan Karantina seolah-olah memaksakan menggunakan EO sehingga kurang efisien dalam pelaksanaannya. Mungkin ini hanya evaluasi saja Pak, barangkali nanti kedepan bisa didata untuk bisa lebih baik lagi.

Yang ketiga, terkait program percontohan budi daya maggot di masyarakat. Pagu alokasinya cukup bbesar 2,4 miliar namun realisasinya masih 0%, mengapa belum realisasi, apa kendalanya. Selain itu terkait dengan pengembangan usaha garam rakyat dan rehabilitasi Kawasan mangrove realisasinya masih sangat minim, nanti mohon penjelasan.

Yang terakhir, ini juga kami sampaikan *Alhamdulillah* di Dapil kami di Kabuapten Jombang kami sudah bekerja sama dengan PT Garam beberapa waktu yang lalu ada dari PT Garam untuk peluang bisnis kepada salah satu Ormas Perempuan di Kabupaten Jombang untuk kerja sama untuk ikut memasarkan garam dan *Alhamdulillah* antusias Ibu-ibu sangat luar biasa ini kami bisa membantu PT Garam untuk bagaimana kalau ini di daerah-daerah lain bisa ada kerja sama seperti ini. Dan *Insyallah* banyak Pak, antusias dari Ibu-ibu karena memang ada sebagian presentasi untuk organisasi perempuan masyarakat di Kabupaten Jombang. Dan kemarin sudah presentasi, PT Garam sudah ikut andil dalam membantu dan kita juga dari kelompok atau Lembaga organisasi sosial kemasyarakatan terutama untuk Ibu-ibu

mamasarkan ini sampai tingkat dusun. Dan terima kasih kerjasamanya semoga ini bisa bermanfaat.

Saya akhiri.

*Wallahu Muwafiq Illa Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Ibu Kiki silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri KKP yang kami banggakan.

Saya hanya ingin sekedar mengingatkan, pertama dikarenakan hasil serapan Bapak pun apresiasi kami yang sebesar-besarnya dengan program-program yang selama ini kami yakin itu memang program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam kondisi Covid hari ini.

Nah, saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Menteri beserta jajaran. Saya membaca bahwa ada program 1 juta nelayan berdaulat, saya hanya ingin mengingat program ini bukan program KKP Pak, tapi program ini milik dari Menkomarinvet yang saya yakin KPP sejogyanya dilibatkan dalam hal ini. Karena apa? Kita disini di Komisi IV DPR RI bicara ketahanan pangan khususnya kalau di KKP kan hasil laut ya Pak, hasil laut ini penting juga sebagai salah satu sektor pangan yang harus dijaga kesinambungannya. Nah, jangan sampai hal-hal yang seperti ini tadi senior saya Kang Haerudin menyampaikan bahwa nelayan-nelayan hari ini juga nelayan-nelayan yang mungkin belum bisa dikatakan sejahtera. 2,7 juta jumlah nelayan kurang lebih.

Nah, terkait hari ini saya harap Bapak tadikan program padat karya tepat sasaran Pak, kemudian inovasi dalam teknologi ini penting juga karena inovasi dalam teknologi ini sangat mensupport nelayan-nelayan tradisional Pak. *real time* kan kayak begitu, supaya mereka bisa terdeteksi jangan sampai di kesampingkan karena banyaknya nelayan-nelayan asing yang masuk juga. Nah, kemudian *supply chain* tadi Bapak Mindo menyampaikan memang ada *cold storage* tapi mungkin ada inovasi lain mungkin *hot storage* kan begitu, karena kalau di Sulawesi mungkin dari Indonesia tengah ke timur tahu ada Cakalang Fufu itukan begitu, itukan bukan *cold storage* tapi itu *hot storage*. Ini mungkin solusinya seperti apa juga inovasi perlu kita bantu untuk mencari solusinya.

Nah, terakhir saya ingin menyampaikan program pemulihan ekonomi untuk perikanan yang terdampak Covid-19, tolong jasa pelayanan untuk penjualan ikan di pelabuhan dimaksimalkan. Mungkin di Sumsel tidak punya

laut tapi sungainya segede laut, Bapak Menteri tahu persis itu saya yakin itu. Dan kemudian *funding facilities* untuk berupa kemudahan pengajuan pembayaran dan usaha para nelayan juga harus kita *supporting*. Karena tidak semua nelayan ini punya kemampuan, kalau di Kementerian Pertanian kan mungkin mereka dengan KUR saya tidak tahu apakah di KKP juga memiliki istilah itu. Karena hari ini nelayan-nelayan juga sangat berkontribusi terhadap kondisi sektor pangan nasional.

Dan kemudian terakhir saya ingin menyampaikan Bapak Menteri, Bapak Menteri ini kebanggaan Sumatera Selatan Pak. Apa pun yang terjadi hari ini saya harap Bapak memberikan terobosan abaikan kanan kiri yang penting Bapak memberikan solusi. Kalau bicara misalkan ada oknum-oknum tertentu saya yakin Bapak berjiwa besar bahwa Bapak bekerja untuk Indonesia bukan bekerja untuk pihak-pihak tertentu. Jadi demikian yang saya ingin sampaikan.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Kata Bapak Ketua, kayak orang lurus kamu Kiki, sudah belajar benar.

Silakan Mbah Tarom, ada laut tidak Madiun?

F-PKB (H. MUTHAROM, S.Sos.):

Tidak ada laut.

KETUA RAPAT:

Sungai saja.

F-PKB (H. MUTHAROM, S.Sos.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota,
Yang saya hormati Bapak Menteri dan jajaran.

Langsung saja saya berbicara masalah serapan yang sudah memasuki semester kedua. Kalau dilihat akumulasi kementerian memang sudah lumayan, tapi begitu kita lihat dari tingkat Dirjen masih ada yang sangat rendah ini apa persoalannya, kemudian rendah ini posisi uang sudah di kementerian atau masih di Kementerian Keuangan. Karena pengalaman saya biasanya dinas-dinas itu nakal Pak, di girokan terus nanti proyeknya ngumpul di belakang, menjadi pendapatan lain yang dipisahkan. Mudah-mudahan tidak seperti itu, karena apa? Karena komitmen Presiden bagaimana kalau serapan ini segera terserap maka akan berdampak kepada masyarakat yang ada di bawah ada perputaran uang, menghidupkan pasar dan lain sebagainya.

Kemudian kami belum melihat, mudah-mudahan Bapak Menteri menganggarkan kaitannya dengan perikanan ini proporsional antara yang laut, tepi laut, para nelayan dan masyarakat yang tidak mempunyai laut. Ya memang yang tidak mempunyai laut ini banyak komoditas atau banyak komoditi yang bisa untuk pendapatata masyarakat. Tapi kalau memang bisa proporsional saya pikir akan lebih baik. Karena persoalannya begini Bapak, di wilayah yang tidak mempunyai laut ini makan ikannya prosentasenya rendah, khususnya di Jawa Timur. Ini kalau nasional sudah 50% di Jawa Timur ini masih 30% termasuk Madiun dan Kota Madiun ini, Kabupaten Madiun 18%, kemudian Kota Madiun 15%, artinya sangat rendah sekali. Maka harapan saya Gemar Makan Ikan ini harus didahului dengan sosialisasi kemanfaatan makan ikan, karena ikan ini komplit sekali kandungannya. Kalau memang masyarakat ingin cerdas ya memang harus banyak mengkonsumsi ikan laut atau ikan budi daya air tawar. Karena kemarin komitmen kita kaitannya dengan Covid-19 ini, Gemar Makan Ikan ini untuk mengurangi *stunting*, tapi kalau cuman sekali-sekali saja bagaimana *stunting* berkurang, karena tidak adanya pemahaman bagaimana manfaat makan ikan ini yang luar biasa. Ini harus didahului dengan pemahaman terkait dengan makan ikan.

Mungkin itu Bapak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ibu Alien Mus, maskernya coba dibuka kalau bicara biar dikenal oleh Bapak Menteri.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang luar biasa, *Insyah Allah* selali dalam lindungan Allah SWT, sehat wal'afiat, Bapak Menteri beserta jajarannya.

Saya sudah mendengar dari beberapa rekan saya, kalau saya memberikan apresiasi di saat pada kondisi Covid-19 ini KKP sudah mencapai 43,6% walaupun memang kalau dirijit ke per Dirjennya memang penyerapannya masih ada masalah tapi setidaknya sampai triwulan II ini penyerapan anggaran sudah hampir 43%.

Terus saya juga ingin menyampaikan ke Bapak Menteri ada isu tentang pelanggaran Kapal nelayan asing yang menangkap di perairan Indonesia, terutama yang kita ketahui ada di Natuna bagian utara kalau tidak salah. Bagaimana itu untuk tindakan untuk pelanggaran tersebut. Terus juga

saya melihat ada beberapa program pelatihan secara *online* kepada pelaku utama perikanan yang belum bisa dikatakan maksimal, kenapa? Karena saya melihat tidak semua pelaku utama perikanan mengerti akan teknologi apalagi di daerah pesisir dan saya yakin dan percaya di daerah Indonesia Timur khususnya Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan NTT Pak, jangankan wifi, internet, signal saja tidak ada dan juga listrik tidak ada Pak. Jadi mungkin untuk proses penganggaran melihat dari keadaan dari geografis daerah tersebut, sehingga satu program itu memang tepat sasaran.

Saya juga ingin menyampaikan Bapak Menteri, di Maluku Utara kan kita ketahui potensinya terhadap hasil laut. Bapak Menteri, kalau di Pertanian atau di KLHK kita mengenal ada kemarau panjang dan juga ada musim hujan, tapi kan kalau di Kelautan tidak ada musim-musim itu. Setiap tahun yang diketahui Bapak Menteri dan jajarannya, di Maluku Utara itu bulan 4 dan Maluku bulan 6 juga kita melakukan selalu setiap bulan-bulan tersebut panen ikan Pak, tapi setelah kita panen ya ikannya mau disimpan dimana, terus juga *cold storage*, terus juga listrik, terus juga masalahnya begitu banyak dan juga BBM yang begitu tinggi. Makanya mohon juga menjadi acuan di daerah Maluku, Maluku Utara itu, Papua, Papua Barat, ini masalahnya sama tentang para nelayan. Yang tadinya mungkin mereka sudah diberikan bantuan kapal tapi dalam BBM itu masih susah.

Saya juga melihat disitu ada sistem logistik ikan nasional Pak, jadi hasil tangkapan ikan di Maluku Utara mungkin juga tetap dibantu untuk SLIN ini karena mungkin hasil tangkap mereka ikan-ikan kalau kita lihat ikan kerapu disini begitu mahal tetapi di Maluku Utara tidak begitu mahal. Maksudnya harganya tetap juga terjangkau dan juga memberikan daya tahan bagi para nelayan untuk tetap semangat untuk penangkap ikan.

Jadi itu yang perlu saya sampaikan Pak Menteri, kita juga harus melakukan program nasional yang berbasis komoditi unggulan. Misalkan kalau memang kita di daerah-daerah yang lain selain yang tadi disampaikan sebelumnya para rekan-rekan yang tidak memiliki laut. Mungkin yang memiliki laut diberikan prioritas seperti apa, yang tidak memiliki laut diberikan prioritas seperti apa. Tadi sudah disampaikan soal *cold storage*, Pak kita butuh *cold storage* dan kita ketahui di daerah timur itu memang ikan Fufu itu perlu tapi masalahnya adalah 3 hari, 4 hari, sudah busuk. Apa yang harus kita lakukan karena memang kalau seandainya tidak bisa disimpan di asepin ikan inikan juga bagus Pak. Terus kemarin juga sempat kita singgung soal ikan tuna yang ekor kuning dan juga yang bukan ekor kuning. Ini sekarang Pak, mereka lagi sampaikan ke saya bahwa sudah banyak sekali ikan tuna yang mereka tangkap akan tetapi harganya memang sungguh sangat dibawah untuk para nelayan, tapi harga jualnya sepertinya lebih tinggi, ekspor juga kayaknya tinggi, tapi ini harus kita berikan atensi.

Dan juga Pak, memang betul nelayan asin itu di daerah Perairan Maluku Utara itu betul-betul harus diperhatikan karena memang kita bertetangga dengan Philipina yang selalu memakai bendera Merah Putih tetapi tidak bisa Bahasa Indonesia. Terus juga permintaan dari Bapak Bupati Morotai yang langsung kemarin juga sudah disampaikan kemudian Bapak

Menteri, tolong itu ditindaklanjuti karena memang sudah hampir 10 tahun belum selesai-selesai juga. Jadi tolong diatensikan.

Terus juga Bapak Menteri tahu sendiri kemarin kita sempat singgung soal ekspor lobster, kemarin juga di Tempo juga begitu ditaruh di depan sebagai. Tapi saya yakin dan percaya dalam mengambil langkah Bapak Menteri tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban dari Kementerian. Maka dari itu Pak, memang peraturan yang Bapak keluarkan memang harus dipublikasikan karena sampai saat ini yang menjadi pertanyaan adalah belum dibentuknya atau keluarnya peraturan tersebut tapi Bapak sudah melakukan ekspor, ini maksudnya benih. Jadi ini berarti harus ada transparansi dalam data yang tadi seperti Bapak Ansi Lema juga sudah meminta.

Saya yakin dan percaya Bapak mau memberikan yang terbaik buat KKP dan semua yang ada disini ingin Bersama-sama dengan KKP untuk kelautan yang baik ke depan dan juga para nelayan yang hidupnya *Insha Allah* sejahtera. Itu saja yang bisa saya sampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Mas Budi karena sudah ditunggu calon istri yang sudah putus akhir sudah pilihannya Bapak Menteri.

Silakan Mas Budi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri yang kami hormati, Eselon I dan tentunya Pimpinan dan teman-teman Komisi IV DPR RI.

Sudah banyak tadi yang mengutarakan apresiasinya mengenai realisasi anggaran. Dalam kesempatan ini saya cuman ingin mengingatkan dua Direktorat Jenderal, yaitu Perikanan Tangkap dan Budidaya. Mengingat ini tulang punggung pemberdayaan ekonomi masyarakat ada di dua KeDitjenan ini supaya bisa digenjot lagi lebih cepat penyerapannya. Bapak Menteri kami dukung kalau ada uapaya-upaya untuk memotong atau bisa melakukan terobosan untuk percepatan realisasi lebih cepat lebih baik.

Dan untuk juga saya ingin mengingatkan untuk BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingat pagu anggarannya BRSDM ini yang paling besar diantara Direktorat Jenderal lainnya. Dalam kesempatan ini kita

harapkan dengan tingginya pagu tersebut benar-benar bisa nanti menunjang SDM yang unggul khususnya program-program pelatihan kepada nelayan-nelayan ini bisa ditingkat dan hasilnya bisa nanti dilaporkan kepada kami. Tolong nanti kalau inikan badan riset, kami ingin mengetahui nanti setelah anggaran ini semua sudah terealisasikan hasil risetnya apa. Semoga nanti benar-benar ada terobosan dari KKP khususnya dari BRSDM yang bisa berguna bagi rakyat khususnya para nelayan. Jadi kami tunggu Bapak Syarif nanti hasil riset dari Badan Bapak nanti seperti apa.

Terkait penanganan Covid Bapak Menteri, saya rasa tadi juga teman-teman sudah banyak menyuarakan program-program yang dinilai sangat baik, kami harap ini dari tahun ke tahun bisa ditingkatkan lagi. Tadi Bapak Tarom benar Gemar Ikan ini moga-moga juga bukan cuman sekali, karena ini program yang sangat baik dan bisa meluaskan wawasan orang untuk mengkonsumsi ikan dan untuk masalah stunting ini penting sekali saya rasa. Jadi kita harapkan ini benar-benar bisa jalan lagi.

Tadi saya juga sangat tertarik Bapak Menteri ada beberapa program yang akan berjalan tahun ini seperti revitalisasi tambak, klaster budi daya udang dan juga model budidaya *shrimp farm*. Jujur saya belum terlalu tahu banyak mengenai model *shrimp farm* ini tapi kok kelihatannya ini cukup canggih, cukup keren, moga-moga ini bisa juga nantinya didatangkan ke Provinsi-provinsi lain yang potensinya juga ada Bapak Menteri, salah satunya Kalimantan Timur.

Terakhir, masalah Covid-19 ini saya menghimbau Bapak Menteri dan jajarannya bisa dari waktu ke waktu juga memperhatikan sentra-sentra perikanan. Sentra perikanan kelautan yang terpadu supaya protokol kesehatan Covid-19 ini benar-benar bisa disosialisasikan dan diterapkan masyarakat luas. Supaya nelayan dan siapa pun nanti yang berkunjung bisa merasa aman. Ya kita harapkan nelayan masih bisa kelaut untuk mencari nafkah tapi mereka juga masih bisa jualan. Kalau masyarakatnya takut datang karena mungkin takut efek kesehatan dan lain sebagainya kan mereka juga tidak bisa menjual produknya. Moga-moga jajaran KKP nanti bisa benar-benar menerapkan protokol yang baik dan selalu mengingatkan masyarakat. Saya teringat Bapak Menteri selalu mengingatkan bahwa kita ini mau menjadi bangsa pemenang marilah kita saling mengingatkan saudara-saudara kita dimana pun mereka berada. Khususnya untuk yang diwilayah KKP saya harapkan ini bisa dijalankan dengan baik. Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, saya mohon ijin jam 12.30 WIB ada Rapat Fraksi Gerindra.

KETUA RAPAT:

Ibu Endang ikut juga, silakan, selamat jalan.

Teuku TA. Khalid belum tanya sudah Rapat Fraksi, selamat jalan. Jangan semuanya lah, Ibu Endang duduk sudah diijinkan sama Mas Budi kan.

Silakan Virtual Mbah Sutrisno, kami persilakan sesuai dengan nomor urut, setelah Bapak Made Urip.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Yang terhormat Pimpinan, Bapak Menteri beserta jajaran.

Saya langsung saja Bapak Menteri, saya akan konsentrasi pada ekspor, impor dan neraca produk perikanan. Yang pertama Bapak Menteri, di halaman 30 yang Bapak sajikan itu diagram volume neraca produk perikanan Januari, Mei 2020 itu tercatat 693,10 ribu ton melebihi volume ekspor dan impor. Catatan saya seharusnya sebesar 387,1 ribu ton yaitu selisih ekspor dikurangi impor. Oleh karena itu, mohon untuk dikoreksi.

Yang kedua, mengapresiasi peningkatan volume dan nilai ekspor Januari, Mei 2020. Namun, bila dicermati secara seksama ternyata kenaikan nilai ekspor lebih lambat atau relatif kecil, yaitu 2,24% bila dibandingkan dengan kenaikan volume ekspor yang mencapai 9,28%. Apa artinya? Artinya ekspor ikan kita telah terjadi penurunan harga. Konsekuensinya devisa yang harusnya kita terima ini pas sekitar 136,16 juta US Dolar. Saran saya adalah agar Ditjen PDSPKP perkuat daya saing produk ikan kita agar mendapatkan pasar dengan harga yang baik.

Kemudian yang ketiga Bapak Menteri, dari sisi nilai volume ekspor itu sebesar 504,31 ribu ton. Kalau kita kaitkan dengan penjelasan Bapak Menteri beberapa waktu yang lalu bahwa ekspor udang saja setahun mencapai 900 ribu ton, artinya apa? Ini kemungkinan hanya udang. Pertanyaan saya hasil tangkapan nelayan kemana. Inilah yang menjadi menyebabkan harga-harga tangkapan nelayan kita itu tidak terserap, mungkin serapannya hanya ke pasar dalam negeri. Kembali lagi kepada Ditjen PDSKPP tingkatkan pemasaran ikan di dalam negeri agar tidak terjadi fluktuasi harga yang merugikan para nelayan kita.

Kemudian yang terakhir Bapak Menteri, saya ucapkan terima kasih louncing BLU untuk para nelayan Patimban yang tergeser masa pencairannya akibat pembangunan Pelabuhan Patimban sudah dilakukan. Program ini sangat penting dan sangat strategis dalam memulihkan ekonomi pasca Covid. Persoalannya adalah masyarakat lapis bawah tidak mengenal adanya BLU ini, tidak paham ke bank yang mana, apakah juga sama prosedurnya seperti KUR. Untuk itu mohon agar institusi Bapak Menteri untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar BLU yang sangat penting dalam rangka mengukuhkan ekonomi ini untuk mengatasi Covid ini agar bisa dicarikan di masyarakat ini.

Terima kasih Bapak Menteri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dari Bali silakan Bapak Made Urip.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Ketua dan Pimpinan Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Anggota baik yang virtual maupun juga hadir fisik yang saya hormati,
Bapak Menteri dan seluruh Eselon I yang saya banggakan.

Pertama, setelah menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tentang pemaparan yang terkait dengan realisasi APBN tahun 2020 bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ini belum maksimal di dalam eksekusi yang berkaitan dengan anggaran.

Bapak Menteri yang saya hormati.

Presiden telah memberikan *direction*, arahan kepada semua kementerian terutama berkaitan dengan penanganan Covid-19 ini diharapkan bahwa semua kementerian itu harus bergerak cepat tidak boleh ego sektoral, kemudian kerja kolektif. Kemudian juga serapan anggaran harus maksimal jangan bekerja lelet, koordinasi dan sinergi harus dibangun oleh semua kementerian termasuk seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai detik ini kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh KKP tentang eksekusi anggaran itu baru saja sekitar 38%. Maka itu, saya berharap kerja yang konkrit di lapangan perlu ditingkatkan oleh Bapak Menteri, karena pada prinsipnya Bapak Menteri adalah pembantu Presiden. Jadi Bapak Menteri harus menerjemahkan visi Presiden, tidak boleh ada visi Menteri dan visi Dirjen. Maka itulah saya berharap eksekusi yang berkaitan dengan anggaran ini supaya betul-betul direalisasikan di lapangan dengan cepat. Itu yang pertama.

Yang kedua, heboh pada saat sekarang ini terutama yang berkaitan dengan benih lobster yang diekspor. Ini menimbulkan kontroversi apalagi media sudah menyorot tentang kondisi ekspor benih lobster ini. Banyak tafsiran-tafsiran yang muncul ke permukaan yang dilakukan oleh Bapak Menteri pada saat ini, terjadi eksploitasi Sumber Daya Alam kita yang berlebihan dan kemudian PNBPN yang tidak maksimal masuk ke kas negara, karena 15 ribu untuk 60 ribu benih itukan sangat merugikan kita.

Kemudian ada juga yang mempertanyakan tentang penunjukkan eksportir yang tidak transparan, yang tidak akuntabel. Kemudian juga tidak memperhatikan pembesaran benih di dalam negeri. Nah, ini tentu sorotan-sorotan ini harus dijawab oleh Bapak Menteri, karena banyak juga menyoroti berkaitan dengan ekspor benih lobster ini berbau politis dan kroni yang dapat itu adalah teman dekatnya. Maka itu harus di-clear-kan oleh Bapak Menteri

ini, karena Bapak Menteri sama-sama sebagai alumni Komisi IV DPR RI barangkali kita berteman disini, supaya betul-betul dijawab kepada publik ini Bapak Menteri tentang kondisi ekspor lobster ini, supaya tidak merugikan negara kita.

Yang ketiga, Menteri terdahulu Ibu Susi begitu sangat luar biasa terutama terkait dengan masalah *illegal fishing* ini. Sampai saat sekarang ini hanya terdengar sayub-sayub saja nyaris tidak terdengar lagi *illegal fishing* ini diperhatikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, jadi barangkali ini perlu dijawab juga oleh Bapak Menteri. Sejauhmana penanganan persoalan tentang *illegal fishing* ini, sehingga nanti kesan yang ada seolah-olah dibiarkan begitu saja tidak ada pengawasan tentang sumber daya kelautan dan perikanan kita sampai saat sekarang ini.

Jadi itu yang ingin saya gali pemikiran kemudian informasi dari Bapak Menteri yang berkaitan pertama dengan penterjemah tentang visi Presiden. Kemudian tentang ekspor benih dan kemudian yang terakhir adalah *illegal fishing* ini. Ini menjadi kajian-kajian sangat serius yang harus dijawab oleh Bapak Menteri.

Terima kasih Bapak Ketua.

Matur suwun.

KETUA RAPAT:

Matur suwun

Silakan Bapak Panggah, ada Bapak Panggah? Kalau tidak ada Bapak Panggah signal ada Bapak Panggah. Oh belum.

Bapak Ono Surono.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ya siap, terima kasih.

Bapak Ketua, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, kawan-kawan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Sedikit saja yang terkait dengan regulasi yang memang di 5 tahun yang lalu itu selalu juga mendapatkan reaksi dari masyarakat. Dan 5 tahun kemarin Komisi IV DPR RI juga secara konsisten bagaimana menyuarakan terkait dengan revisi Permen yang mengatur terkait dengan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dan juga Permen yang mengatur terkait dengan alat-alat tangkap yang dianggap tidak ramah lingkungan. Saya yakin Bapak Menteri hafal betul bagaimana situasi pada saat itu. Sehingga sekarang isu terkait dengan lobster itu sudah mulai bergeser, sudah bukan pada aspek

lingkungan, sudah tidak pada aspek ekonomi, sudah tidak pada aspek sosial, tapi terkait dengan siapa yang diuntungkan dalam kebijakan terkait dengan impor atau penangkapan lobster tersebut.

Sehingga Bapak Menteri saya sih usul saja, supaya hal ini tidak melebar kemana-mana yang jauh dari substansi awal terkait dengan perubahan Permen itu. Saya yakinlah Eselon I dan pejabat yang ada di KPP saat inipun yang pada saat itu juga ikut merancang terkait dengan Permen Lobster, Permen Cantrang dan lainnya. Sehingga harus ada sebuah isu atau opini yang disosialisasikan kemudian masyarakat yang tidak terlepas kenapa dulu dilarang jamannya Ibu Susi dan sekarang diperbolehkan jamannya Bapak Edhy Prabowo. Nah, sehingga aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, yang terkait dengan itu ya seharusnya lebih menekankan kepada Irjen misalnya yang bicara kepada masyarakat, kepada media, sehingga mereka pun bisa menjelaskan dulu kenapa dilarang sekarang kenapa dibolehkan, sehingga tidak melebar kemana-mana isunya. Nah, sehingga saya berharap Bapak Menteri saya yakin sudah melakukan sesuatu berdasarkan apapun yang berkembang di masyarakat, tapi tentunya Komisi IV DPR RI juga wajib menjaga bagaimana kawan terbaik dari Komisi IV DPR RI, yaitu Bapak Edhy Prabowo untuk tidak juga mendapatkan hantaman dari media atau dari siapa pun.

Yang kedua, ini terkait dengan rencana kunjungan Bapak Menteri ke Dapil saya di Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Mohon maaf Bapak Menteri, karena saya baru mendapatkan kabar waktu hari Sabtu malam dan sudah teragendakan juga kegiatan hari ini dan besok di Bandung, sehingga mohon maaf saya tidak bisa mendampingi. Tapi ada beberapa hal yang dalam undangan tersebut misalnya Bapak Menteri ke Indramayu, ini di Karangsong misalnya disitu membicarakan cantrang. Karangsong itu tidak ada satu pun cantrang disitu, tapi lebih pada isu kemarin yang sudah saya sampaikan fasilitas pangkalan pendaratan ikan di Karangsong yang tidak memenuhi standar untuk didaratkannya kapal-kapal besar yang sampai 150 GT sehingga berefek kepada turunnya harga ikan, bongkar ikan yang lama sekali dan terkait dengan hal-hal lainnya yang berujung kerugian para nelayan, sehingga akhirnya mereka membongkar ikan di Muara Angek dan Muara Baru. Sehingga pada saat Bapak Menteri nanti berkunjung ke Karangsong mungkin lebih pada aspek terkait peningkatan sarana dan prasarana di Karangsong untuk bisa memenuhi standar bongkar ikan sebagaimana diharapkan oleh para nelayan terutama kapalnya yang besar-besar.

Untuk lebih penting lagi saya sih mendorong Bapak Menteri untuk bisa meningkatkan status pangkalan pendaratan ikan Karangsong yang fasilitasnya masih terbatas dengan mungkin sudah ratusan kapal yang sudah di atas 30 GT, sehingga ini bisa ditingkatkan menjadi pelabuhan perikanan nusantara atau bahkan pelabuhan perikanan Samudera. Sehingga ujungnya pada saat misalnya ada penekanan dari Pemda Kabupaten Indramayu dari koperasi misalnya untuk sebuah kapal bongkar di Karangsong yang merupakan pelabuhan pangkalannya tapi juga mereka menyiapkan fasilitas-fasilitas yang tidak merugikan bagi nelayan-nelayan yang besar tersebut.

Mungkin itu saja Bapak Menteri, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf nanti saya tidak bisa mendampingi, mudah-mudahan kesempatan yang lain saya bisa mendampingi Bapak Menteri.

KETUA RAPAT:

Kemana Bapak Ono kok mendampingi. Bapak Ketua ada kesibukan kok tidak mendampingi Bapak Menteri.

Silakan Ibu Vita, virtual juga Ibu Vita.

F-PDIP (VITA ERVINA, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Pak Ketua, Pimpinan.

Saya langsung saja Bapak Menteri, saya ingin menyoroti terkait dengan programnya Minapadi. Ini adalah program yang bagus terobosan untuk masyarakat, maka itu saya mengusulkan agar program Minapadi ini bisa dilakukan pemerataan di semua provinsi yang ada potensi lahan untuk persawahan, tidak hanya di 7 provinsi saja. Karena dengan sistem yang menggabungkan pertanian dan perikanan tentunya sangat membantu pemenuhan perekonomian petani dan ketahanan pangan masyarakat.

Kemudian yang kedua Bapak Menteri, saya menyoroti terkait dengan budidaya lobster. Saya meminta agar KKP bisa lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi keseimbangan dan kesinambungan ekosistem laut. Jangan seakan-akan kita berpihak kepada nelayan, namun sesungguhnya tidak menyentuh peningkatan dan perekonomian nelayan.

Demikian dari saya singkat saja Pak Ketua, Bapak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Langsung Ibu Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri, Bapak Dirjen sudah ada Dirut Perindo, Perinus, Garam dan Pimpinan semuanya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Yang ingin saya sampaikan ada beberapa hal yang pertama adalah saya sangat berharap kepada Bapak Menteri yang sangat kita harapkan ini untuk tidak kehilangan momentum pada saat ini di mana semua pihak sebenarnya sedang berbenah, sedang menata diri untuk menunjukkan *performance* yang terbaik karena situasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Presiden Bapak Jokowi bukan kondisi yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kita menginginkan respon Bapak Menteri menghadapi Covid ini dan juga langkah-langkah Kementerian juga tidak biasa-biasa saja.

Nah, kalau dilihat dari laporan serapan anggaran yang sudah disampaikan tadi sebenarnya banyak hal yang masih perlu dan sangat bisa ditingkatkan terutama tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman juga termasuk catatan saya di mana ada beberapa program yang semestinya itu bisa membantu nelayan, bisa membantu untuk budi daya perikanan terutama perikanan yang budidaya ini Pak, karena dari awal sampai akhir yang banyak disebut inikan yang tangkap yang nelayan, yang punya laut. Nah, kalau Dapil saya juga teman-teman lain di wilayah Jombang, Mojokerto dan sekitarnya yang tidak punya laut itu kayak gimana, padahal mereka juga banyak yang melakukan budidaya di sektor perikanan ini.

Yang kedua Bapak Menteri, saking saya ingin mengulangi lagi karena kebetulan isu ini harus menjadi gerakan bersama lintas kementerian dan juga kelembagaan. Kita berharap bahwa bantuan pangan sekali lagi kita tekankan harus diisi dengan isian yang bermutu dan kualitas. Nah, ini semestinya kementerian Bapak bisa menawarkan diri untuk mengambil bagian yang sangat penting agar bantuan pangan, bantuan sembako ke masyarakat ini yang jumlahnya sampai puluhan juta itu tidak diisi oleh makanan yang tidak sehat dan tidak

KETUA KOMISI IV DPR RI/FPDIP (SUDIN, S.E.):

Mbak Luluk kalau bisa fokus kepada pengawasan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Bapak Menteri saya berharap bahwa serapan ikan dari produk seperti nelayan kerambah terutama di Dapil saya itu juga bisa diserap. Nah, saya mohon nanti juga Dirut Perindo bisa diberikan penugasan agar nelayan-nelayan yang seperti ini tidak di anak tirikan, gitu Pak Menteri. Seperti di Sragen, Wonogiri yang semuanya terdampak mereka tidak bisa ngapa-ngapain padahal produksi harian mereka, kayak ikan nila saja itu bisa 15 ton tetapi selama sekian bulan terakhir tidak bisa dilakukan serapan yang maksimal hanya sekitar 2 ton. Itu pun sekarang jumlah ikannya sudah gemuk-gemuk jadi malah tidak bisa digunakan karena tidak memenuhi espektasi di pasar. Tetapi persoalannya bahwa terkait dengan serapan ini ternyata kita sangat kekurangan adanya fasilitas seperti *cold storage*. Nah, kalau kemudian kementerian bisa memberikan bantuan ini saya kira sangat kita apresiasi sekaligus menunjukkan bahwa kita ingin memajukan bareng-bareng bukan hanya budidaya yang tangkap, yang punya laut tetapi bahkan nelayan

kerambah yang punya anggota keluarga juga bisa kita urus dengan sebaik-baiknya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Mbak Luluk, cukup ya. Selanjutnya Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Bapak Menteri yang saya banggakan dan segenap pejabat di lingkungan KKP.

Mengapresiasi pergerakan anggarannya yang hampir tepat waktu setiap triwulan. Ada beberapa hal, yang pertama mungkin nanti akan menjadi rekomendasi ini Gemar Makan Ikan. Bagaimana setiap triwulan ada kebijakan Gemar Makan Ikan yang diluncurkan ke seluruh Republik Indonesia khususnya Dapil Anggota yang terhormat ini.

Yang saya ingin berikan pendapat adalah isi bagaimana sudah tidak ada bahan olahan. Maksimalkan hasil tangkap nelayan langsung, dan pembudidaya. Bahan olahan itu sudahlah pabrikan biar menjual ke rakyat langsung, Pemerintah itu beli langsung kepada rakyat. Ini akan lebih manfaat Bapak Menteri, silakan sudah pakar mana pun, professor maupun tidak professor ini kebijakan yang tepat. Belanjanya dimana? Di perairan setempat, belanja di NTT jangan di belanja di Bali. Manakala itu ke Pemprov Bali atau Dapil Bali belanja di Bali. Belanja di olahan dapur rakyat itu juga saya sarankan seperti yang saya pernah lontarkan ada Ibu-ibu yang memasak tangkapan suaminya, kemudian diproduksi menjadi ikan asap, di sepanjang jalan di tempat saya itu sudah jadi tujuan orang membeli ikan asap. Saya tidak sependapat tatkala beli pabrikan.

Yang kedua, asuransi dan KUR bagaimana ini terpublikasi sampai dengan luas secara maksimal dan ada kantor. Kantornya itu bagaimana di seluruh PPI dan TTI ada kantor KUR dan asuransi. Kalau ini numpang di kantornya Dinas Kabupaten/Kota setempat akan tidak terpublikasi dengan baik dan sempurna, karena tidak akan mungkin staf bupati dan walikota itu mempublikasikan karena tidak ada anggarannya, kecuali Bapak dan Ibu sekalian menganggarkan di transfer kepada bupati dan walikota itu akan berjalan sebagaimana yang diharapkan Bapak Menteri. Sekali lagi asuransi ini penting karena belum terpublikasi dengan baik dan rakyat merasa sulit mengklaim asuransinya serta KUR. KUR ini, hari ini pada saat pandemi maupun setelah pandemi Covid-19 ini dibutuhkan oleh rakyat bagaimana Rentenir ini tidak massif pergerakannya kepada rakyat sebagaimana tadi para Anggota menyampaikan kalau berbicara orang miskin ini kan perut kita sakit Pak, selalu mulai semenjak Republik belum merdeka hingga hari ini nelayan dan petani itu stempelnya selalu miskin. Bapak Edhy tidak usah mendengarkan Ibu Susi yang sedang nyanyi diluar panggung. Biarkan dia nyanyi, semakin di kencang semakin terpublikasi dengan baik kinerja Bapak Edhy, kan begitu. Tingkatkan harkat dan martabat rakyat khususnya nelayan.

Yang ketiga yang terakhir, tadi di sampaikan oleh banyak teman-teman bagaimana KKP ini masuk kepada lembaga pendidikan. Kalau urusan peningkatan keimanan itu tugas kyainya lah, imunnya itu tugas Pemerintah, Pemerintah hadir di pondok pesantren karena Pemerintah menjadikan *pilot project* pendidikan masuk di awal itu pondok pesantren hari ini. Ada payung hukum yang memperbolehkan Bapak Menteri masuk pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, kebetulan saya ikut membahas karena sebelumnya saya Komisi VIII DPR RI. Sekali lagi segera pesantren dibantu oleh ikan segar oleh KKP, karena *Insya Allah* dengan itu nanti akan bantuan dari Presdien, karena Presiden menginstruksikan jadikan *pilot project* pesantren itu untuk proses belajar dan mengajar di awal, kalau umumkan belum dibuka sehingga judulnya anak calon pemimpin ini kembali ke rumah kedua karena dikarantina di pesantren kan tidak boleh keluar.

Barangkali 3 hal itu Bapak Edhy yang ingin saya tegaskan sehingga nanti *insya allah* akan jadi rekomendasi terutama Gemar Makan Ikan. Kami persilakan Bapak Ketua untuk melanjutkan karena tidak ada skors maksimalkan sebelum Ashar selesai biar ada kesempatan sholat yang lain.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, selanjutnya kami persilakan kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan jawabannya. Karena disini banyak yang sedang Rapat Banggar, Rapat Fraksi saya minta jawabannya dijawab tetapi juga tetap tertulis. Karena kami sudah komitmen semua keputusan internal setiap ada Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dijawab tapi juga tertulis.

Silakan Bapak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Ketua, Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI baik yang berada di ruangan rapat Komisi IV DPR RI maupun yang di virtual.

Saya merangkum setidaknya ada 18 item pertanyaan besar dari 26 Anggota dan Pimpinan yang dipertanyakan kepada kami. Saya akan *highlight* garis besar Bapak Ketua, tadi bicara Bapak Ketua tadi mengingatkan tentang menanyakan tentang Piamari dan Miamari. Miamari memang ada temuan-temuan yang sekarang dalam proses kami perbaiki Bapak Ketua, tentang kekurangan pekerjaan pembangunan klasifikasi dengan mitra ini sedang disempurnakan kekurangan 301 juta. Kemudian kekurangan pembangunan aquarium senilai dari rekanan PT KSO Pangan Megah sebesar 1,896 miliar. Kemudian untuk Miamari kekurangan pekerjaan sekitar 1 miliar Bapak Ketua. Ini sedang dalam proses dan semangat pembangunan kedua tempat ini tadinya karena disitu merupakan perlintasan ruaya ikan dan juga

kalau dilihat dari sisi geologi adanya lempeng *pacific ocean*. Kalau lihat dari semangatnya Bapak Ketua, memang benar tinggal hanya bagaimana setelah dibangun pemanfaatannya. Ini nanti akan kami terus matangkan Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak Menteri, semangatnya bagus terus yang mau kesana siapa. Paling tidak kan yang nama aquarium itu untuk tempat belajar, sekarang siapa yang mau ke Pangandaran, berapa jam kalau mau naik mobil. Apa karena menterinya dari Pangandaran, kemudian siapa mau satu tempat lagi yang di Morotai, siapa yang mau ke sana? Kenapa tidak di tempatkan misalnya di Banten, kan sebagian besar penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Kalau ke Banten kan orang dari Jawa Tengah gampang atau dimana tempatkan di tengah-tengahnya misalnya di Semarang kah, di tegal. Jadi dari Jawa Timur, dari Jakarta kan lebih gampang. Coba kalau di Morotai, saya yakin menjadi bangkai, karena kalau kita mau ke Morotai ongkosnya berapa puluh juta bolak-balik. Apa mungkin anak sekolah SMA bisa jalan-jalan kesana melihat, belajar, mengetahui, kan ini masalahnya Bapak Menteri. Nah, kita saksikan saja kalau sudah selesai jadi bangkai atau jadi apa.

Silakan Bapak Menteri lanjutkan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Baik Bapak Ketua, saya tidak bermaksud melempar tanggungjawab karena memang pada saat masuk itu barang sudah ada tinggal saya meneruskan akan saya pergunakan seoptimal mungkin dari semangat yang Bapak Ketua sampaikan tadi, saya sangat setuju. Tapi karena barangnya sudah ada dan tidak bisa dipindah jadi kami hanya bisa mengoptimalkan yang ada dulu Bapak Ketua. Dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa sesuai dengan rencana.

Yang kedua, tentang nilai tukar nelayan memang yang tadinya ditanyakan kok 98 memang benar dari sisi situasinya memang ada penurunan. Namun, penghitungan 115 yang pertama itu karena BPS mempunyai standar penghitungan yang berbeda Bapak Ketua, sehingga mengacu ke 2012 dia kembali lebih kecil Bapak Ketua, tidak pakai standar 115 makanya secara standar 98 ini sudah termasuk tinggi, hanya memang tetap di bawah dari target kita.

Kemudian harga ikan ini terus kita laksanakan dengan menjaga dan berkordinasi dengan seluruh wilayah. Berhubungan juga dengan Menteri Sosial, *Alhamdulillah* dari semua kementerian komunikasi kami tidak ada masalah, Menteri Perhubungan, Menteri PU, Menteri Sosial tentang sebagai misal ini Bapak Ketua, Bansos-Bansos yang digelontorkan kami berkoordinasi dan saya menghadap Menteri Sosial untuk minta khusus dan bersurat bahwa bantuan-bantuan sosial sembako dan sebagainya itu melibatkan ikan-ikan dan *Alhamdulillah* sudah ada Permennya Bapak Ketua dari Menteri Sosial. Dan ikan merupakan bagian yang diwajibkan dan kami juga meminta seluruh

kepala daerah yang sebagai eksekutor pembagian ini untuk memasukkan ikan-ikan terutama yang ada di daerahnya masing-masing. Ini terus kami kawal tentunya masih perlu waktu dalam pelaksanaannya yang jelas semangat awalnya sudah dan ini sudah dibuktikan di beberapa tempat Bapak Ketua, hanya saja kami terus mohon dukungan dari Bapak dan Ibu sebagai yang mengetahui daerahnya masing-masing untuk diingatkan.

Tadi Ibu Julie masalah PKK Ini salah satu *stake holder* yang memang wajib kami libatkan. Kalau memang ada di seluruh Indonesia tidak hanya di NTT, siapa pun bisa mengakses dan program ini bisa kita lakukan, baik yang menggunakan APBN, menggunakan BLU, BLU yang di KKP maupun yang menggunakan KUR. KUR ini hanya masalah perlu sosialisasi saja Bapak Ketua, kalau dari penyerapan KKP sendiri itu baru sampai 2,5 triliun saja dari 194 triliun KUR yang siapkan oleh Pemerintah. Berbeda jauh dengan Menteri Pertanian yang sudah menyerap sampai lebih dari 15 triliun.

Nah, ini kalau menurut pengalaman yang kami lihat adalah kekurangan sosialisasi dan pembinaan kami sampai tingkat bawah, karena tidak semua nelayan memahami, sebagian besar nelayan masih belum memahami ini. Kalau yang tidak mampu sampai ke KUR kita juga punya dana BLU Pak Ketua, sebesar sekarang *Alhamdulillah* sudah terserap cukup lumayan banyak dari kemarin saya masuk masih 1,1 sekarang sudah mengarah 800 miliar sisanya, ini terus berputar dengan bunga 3% Pak Ketua. Jadi Ibu Julie, kalau PKK bisa juga mengakses BLU ini tanpa adanya agunan, hanya kami butuh pendampingan dan melihat kegiatannya apa. Kemana bantuannya itu bisa lewat kepala-kepala dinas dan bisa langsung kalau Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI perlu bisa langsung kasihkan proposal kepada kami, pasti kita respon dan segera begitu secara hitungan apa yang dilakukan sebagai misal membangun tambak, sebagai misal membangun kolam, dan yang lain-lain termasuk beli *cold storage* pun bisa kita akses untuk ini. Termasuk kalau Bapak dan Ibu yang tadi menjadi, kami juga tidak mau menjadi dikotomi antara pinggir laut dan non laut atau gunung dan pesisir, tidak ada, kami anggap semua sama tinggal saja mungkin bagaimana mensiasatinya sehingga bisa semua perikanan ini bisa masuk ke lokasi-lokasi sampai masyarakat.

BLU ini bisa digunakan untuk juga membangun sentra kuliner selama ada si penjamin dan ada si pelakunya dan kita hitung bisa kembalikan uangnya dan satu tahun uangnya hanya 3%. Ini bisa diakses dan saya pikir ini sangat bagus untuk Dapil Bapak dan Ibu semua, dan ini kalau Bapak dan Ibu berhasil di Dapil kan bisa dicontoh untuk daerah-daerah yang lain. Kenapa saya mengajak Anggota DPR RI, karena saya yakin teman-teman Anggota DPR RI ini lebih memahami situasinya daripada kami-kami yang ada di kementerian. Saya juga sedikit punya pengalaman Bapak waktu di DPR RI dulu.

Kemudian tentang penyerapan anggaran, terima kasih atas masukannya kami tidak berdalih karena ini Covid-19, memang masalahnya juga karena kita terkendala itu. Tapi terus dengan 43% total ini, 38 dan 43 ini sebenarnya kita termasuk sudah mem-*boost* cuman kita terus ingin

mendorong terus. Dan *Insy Allah* sudah kami setiap rapat Rapim dan Bapak Sekjen terus kami minta untuk mengontrol dan *Alhamdulillah* tadi ada pertanyaan besar dari budidaya dan tangkap, ini semuanya sedang proses Bapak Ketua.

Kemudian Bapak Mindo terima kasih tentang alternatif *cold storage* memang tidak bisa mengatasi masalah negeri ini hanya dengan salah satu alternatif. Saya pikir terima kasih masukan dengan *sodium hypochlorite* saya baru tahu ini Pak Mindo, dan mohon nanti kalau memang ada tempat-tempat yang bisa kita cek yang sudah melakukan mohon kami diberi masukan. Saya minta nanti Bapak Dirjen PRL dan Dirjen PDS untuk menangkap ini sebagai satu peluang bagus.

Terus masalah maggot sebagai alternatif bahan pakan ternyata memang perlu kernel dari sawit, saya pikir itu tidak terlalu masalah nanti. Mungkin ngambilnya tidak secara nasional Pak, per daerah, per kasutis, sebenarnya Bupati dan Gubernur itu secara prinsip mereka siap untuk mendukung yang seperti ini.

Kemudian masalah kegiatan tadi yang ada di Menkomar, Menkomar adalah Menteri Koordinator kami. Dan apa pun yang dilakukan merupakan terobosan dan itu mendukung sehingga kami pasti akan mendukung, walaupun seolah-olah tidak kelihatan tapi secara prinsip sebenarnya kami jalannya bareng, tidak ada masalah.

Tentang 1 juta Nelayan berdaulat, untuk Maluku kami dalam waktu dekat juga akan merencanakan kesana bersamaan dengan bagian wilayah Indonesia Timur lainnya. Kita juga memahami tentang kesulitan bagaimana menyerap ikan, BUMN sudah kami komunikasikan. Bapak Ketua, tadinya kita minta untuk penyertaan modal negara, namun setelah dipikir-pikir kalau penyertaan modal negara lagi akan sama konsepnya yang lama, ternyata cukup dengan tidak perlu dengan penyertaan modal negara cukup biaya operasional yang nanti Himbara, bank-bank negara yang akan meminjamkan uang ke BUMN kita, yaitu Perinus, Perindo maupun PN Garam. Dan ini sedang dalam taraf pemantapan-pemantapan teknisnya.

Sementara itu Bapak Ketua, kami sendiri sudah memberikan bantuan penguatan juga dari sisi *cash flow*-nya mereka dengan meminjamkan BLU melalui pihak ketiga sebanyak 30 miliar Perindo Bapak Ketua. Jadi ini tercatat dan gunanya hanya untuk membeli hasil-hasil produksi ikan masyarakat, baik itu budidaya maupun tangkap. Dan ini sudah kita dorong terus, jadi mohon masukan apabila nanti ada daerah-daerah yang memang disasar belum sampai secara teknis, secara paralel mohon ini disampaikan kepada kami.

Kemudian dengan perempuan, kami sudah berkomunikasi dan berkordinasi dengan Ibu Menteri Bintang Puspa Yoga, sudah banyak proposal yang beliau sampaikan tentang kegiatan-kegiatan di sektor perempuan. Kami juga punya keinginan bagaimana ke depannya ini perempuan bisa ikut jadi nelayan juga, mengendalikan kapal, menangkap ikan di laut. Karena sebenarnya bukan hal yang luar biasa sulit untuk

dilakukan, kalau perempuan saja sudah bisa untuk mencangkul di sawah saya pikir melaut itu hal yang lebih ringan daripada bercocok tanam di sawah.

Untuk ini tadi Gemar Ikan Bapak Ketua, kami secara prinsip kami ingin menambah jumlah Gemar Ikan, karena ini selain juga meningkatkan semangat untuk pencegahan *stunting*, memang benar Bapak Mindo jangan hanya sebagai kayak kita bikin acara kayak *ceremony* tetapi ada semangat filosofis yang kita dorong. Saya sangat percaya orang Indonesia di abad XI-XIII dulu tinggi-tinggi Pak, tidak ada orang Indonesia yang pendek. Kalau tidak percaya itu ada film yang sekarang di film-kan tetapi intinya bahwa kalau mengacu dari itu bahwa orang di sekitar Indonesia ini dulu besar-besar. Ada tokoh yang namanya Biamba di film Marcopolo, Marcopolo adalah tangan kanannya Kubilaikan. Salah satu anak angkatnya Kubilaikan namanya Biamba, Biamba itu ibunya orang Jawa, tingginya besar. Artinya, abad XII-XIII orang kita tinggti-tinggi, kenapa sekarang kecil. Ibu dan Bapak sekalian, pernah dengar di kampung-kampung kalau orang tua kita dulukan kalau suruh kita makan ikan banyak selalu alasannya cacingan, makanya banyak yang tidak makan ikan. Makanya ikan sekarang harus kita kembalikan lagi paradigma tentang makan ikan itu akan cacingan, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa kalau kita banyak makan ikan itu cacingan. Paling kalau banyak makan ikan karena ikan agak mahal habis sedikit uangnya, tapi yang jelas kan stamina dan daya tahan akan naik, karena apa? Omega 3 ikan dengan daging itu bedanya sampai 10 kalinya Bapak Ketua.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kemudian bicara tentang kapal ikan asing, kami terus berjuang dan sampai sekarang 53 itu bukan cerita semuanya ada data. Kalau dihitung per hari ini, kalau kita mau hitung secara kuantitatif jumlah kapal yang kita tangkap itu sebenarnya seminggu 1-2 kapal. Artinya, setiap minggu saya menangkap 2 kapal, hanya saja memang saya kan tidak suka juga bicara masalah untuk mencari kepopuleran, untuk apa? Tapi faktanya ada.

Bapak dan Ibu sekalian.

Semangat anak-anak buah kita, ABK-ABK kapal kita yang menangkap, yang menjaga sekarang ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada video yang memang tidak kami muat ke semua jajaran, saya ingin ini menjadi satu catatan tersendiri kemudian KKP ke depan bahwa tugas menjaga negara adalah kewajiban apalagi kita ditugaskan sebagai pejabat negara.

Jadi Bapak Ketua, ada salah satu anak kita yang berani loncat dari kapal pengawas kemudian menangkap kapal yang sekarang. Karena kapal begitu sudah ketahuan Pak Ketua, mereka stirnya itu diikat, gasnya diberi pemberi pemberat sehingga dia melajunya kencang. Sementara mereka lari kegeladak, karena tidak bisa ditembak, tidak bisa terlindung sehingga Bapak Ketua. Nah, ini hanya bisa dilakukan, diberhentikan kalau kita loncat ke kapal itu. Dengan anak buah kita sampai seperti itu semangatnya menjaga laut kita. Semangat mereka nanti Bapak Ketua dan Bapak, Ibu sekalian bisa cek dan kami butuhkan kehadiran Bapak dan Ibu untuk menyemangati juga dan

mereka masih terus tinggi dan *Alhamdulillah* dari Menteri Keuangan juga sudah meningkatkan uang makannya yang tadinya hanya Rp35 ribu sekarang sudah sampai Rp50 ribu per harinya. Dan ini satu kemajuan bisa di samping itu remunerasinya juga ada, walaupun belum maksimal tapi ini sangat membantu Bapak Ketua. Jadi semangat menjaga laut tidak berhenti.

Tentang penenggelaman Bapak Ketua, semangat kami menenggelamkan kalau ada kapal-kapal itu tidak mau dihentikan ya tenggelamkan Pak Ketua. Kemarin kalau Bapak Ketua sempat kami laporkan ada satu yang tenggelam itu ya karena itu dampaknya, dia lari tertabrak, dia tidak bisa menghindar, ya apalagi itu bagian dari penenggelaman. Hanya saja kami tidak mau bergeming di publik bahwa seolah-olah hanya ini. Pekerjaan kita banyak yang lebih mulai, banyak yang lebih besar lagi yang harus kita tangani, biarlah masyarakat yang menilai ya secara prinsip bagi kami selama Komisi IV DPR RI selalu mendukung pekerjaan kami itu jauh lebih dari cukup Pak Ketua.

Kemudian masalah lobster, saya harus sedikit bicara lebih detail tentang ini sekali lagi. Lobster ini sekali lagi Bapak Ketua, semangat kami menghidupi lobster memberikan izin penangkapan benih lobster itu adalah untuk menghidupi nelayan yang selama ini hidupnya tergantung makannya dari menangkap benih ini Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian. Dulu pernah ada kemudian ditiadakan, akhirnya mereka tidak punya pekerjaan. Kalau dari sisi logika akademis maupun dari sisi ilmu pengetahuan lobster ini kalau dibiarkan di alam hidupnya hanya yang lahir banyak ini hidupnya hanya 0,02%. Artinya, setiap 20 ribu ekor lobster itu hanya satu yang akan besar, karena saking tidak tahu mungkin hukum alam. Sementara kalau di budi dayakan itu ada bisa yang 30%, bisa juga yang 70%, 80%.

Dulu Indonesia pernah kerja sama dengan penelitian dari Australia yang sekarang meneliti lobster bisa sampai menuju ke pengembangbiakannya sendiri, kita dihentikan selama 5 tahun terakhir ini. Saya tidak tahu alasannya akan tetapi yang jelas kita sekarang lanjutkan lagi kerja sama itu untuk lebih mendalami lebih jauh. Jumlah potensi lobster di Indonesia ini untuk total seluruh WPP ada 27 miliar lebih. Dari 27 miliar lebih karena kita ada 6 jenis lobster tetapi yang populer 2, lobster Mutiara dan lobster Pasir itu totalnya berarti kita anggap saja 2/6 itulah angka lobster yang sebenarnya ada di Indonesia hampir 10 miliar, 10 miliar untuk 2 jenis ini.

Kalau di tanya *base on* apa, berdasarkan apa kami memutuskan, berdasarkan nilai historis kemanusiaan karena banyak rakyat kita butuh makan, tapi berdasarkan ilmiah kita juga ada. Kalau ditanya dulu penelitian, dulu tidak ada penelitiannya, ini Dirjen-dirjen saya ada di sini belum berubah orang-orangnya.

Bapak dan Ibu sekalian.

Eksplorasi berlebihan kami tidak akan membiarkan eksploitasi berlebihan. Keseimbangan alam kami sangat yakin ini tidak merusak

keseimbangan alam, karena setiap orang yang kami wajibkan untuk menangkap dan membudidayakan ini diwajibkan 2%-nya dikembalikan. Kalau 2% dari total kehidupan yang bisa terjadi dilapangan 0,02 itu berarti sudah 100 kali pertambahan lobster baru yang muncul, karena kita diwajibkan kembali yang cukup dewasa untuk bisa bertahan hidup.

Kemudian dari sisi devisa negara, rakyat yang menangkap lobster kita atur, mereka wajib dibeli harganya tidak boleh dibawah Rp5 ribu. Tidak ada penekanan harga dari rakyat, kalau ada perusahaan yang kita ijinakan menekan harga itu akan kami langsung cabut. Kontrolnya sangat mudah karena semuanya terdata, dimana posisinya, dimana tempatnya, dimana mereka berusaha. Dan yang kami wajibkan pertama kali bukan ekspor benihnya Bapak dan Ibu sekalian, ekspor benih ini pada waktu tertentu ini akan kita hentikan begitu budi daya kita sudah menampung. Kenapa sekarang diijinkan diekspor? Karena begitu mereka sudah beli, menangkap tempatnya tidak cukup, sementara apa kita harus kembalikan ke alam lagi. Kita ingin seluruh rakyat kita makan, rakyat itu bukan hanya nelayan saja, si pengusaha ini juga salah satu pilar yang penting juga, merekalah yang menggerakkan ekonomi. Apa kita mau rakyatnya makan, perusahaannya habis, nanti siapa yang ngasih beli lobster yang mereka tangkap berikutnya. Ini semangat kami.

Kalau Bapak dan Ibu ada yang menilai, ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu, tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu, mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal, tapi sisanya yang 26 itu, 24 orang lagi siapa itu? Itu semua orang Indonesia. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra dan saya pun tidak bisa komunikasi setiap saat, yang memutuskan juga bukan saya, tim. Tapi ingat tim saya kontrol selama dia tidak mengikuti kaedah apa yang sudah diputuskan dalam tim besar kita dengan melibatkan para ahli-ahli, juga kita akan larang tidak akan ijin. Surat perintah terhadap pemberian terhadap ijin itu tidak dari Menteri tetapi dari tim yang sudah ada, dari budidaya ada, dari tangkap ada, dari tangkap ada, dari karantina ada, Irjen kami libatkan, Sekjen kami minta awasi. Dulu dipermasalahkan karena begitu pertama keluar 9 perusahaan diberi *previlage*, 9 apa? Itu lagi proses semua dan dari 26 yang ada ini terus berjalan sampai 31, terus lagi siapa pun silakan masuk.

Bapak dan Ibu sekalian.

Saya tidak peduli akan dibully seperti apa mengelola negeri ini, selama saya sangat yakin tujuannya itu mulia untuk membela rakyat saya, saya tidak peduli gambar saya dibikin telanjang yang penting rakyat saya makan Bapak dan Ibu sekalian, yang penting saya masih didukung oleh Komisi IV DPR RI Bapak dan Ibu sekalian.

Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir kita satu frekuensi dan saya tidak akan sedikitpun punya niat untuk memperkaya diri saya. Saya tidak ada industry bisnis di sektor perikanan dan kelautan, istri dan keluarga saya tidak ada yang saya libatkan disini dan saya jamin untuk itu. Saya selalu setiap

saat berkoordinasi dengan semua Pemerintah, semua Menteri, Menko kami, seluruh Menko, urusan kebijaksanaan Menko Maritim karena yang membidangi, urusan ekonomi Menko Ekonomi, kemudian urusan pertahanan tentang kasus Natuna sebagai missal. Diributkan di Natuna ada nelayan asing dari total 53 kapal yang kami tangkap, 30 kapal kami tangkap dari Natuna.

Bapak dan Ibu sekalian.

Ke depannya dipermasalahkan kok tidak ditenggelamkan, kenapa harus ditenggelamkan kalau masih punya nilai ekonomi. Ada kampus-kampus jurusan perikanan kita yang butuh kapal-kapal latih, kapal-kapal untuk praktek, kenapa kita harus tenggelamkan. Bapak dan Ibu sekalian, menenggelamkan kapal itu butuh biaya lagi, setelah putusan pengadilan tenggelamkan, 50 juta sampai 100 juta harus ada biaya menenggelamkannya lagi, ngebornya, bakarnya, nyari tempatnya, ngumpulin orangnya, ngumpulin medianya, konsumsi dan sebagainya. Saya tidak mau lagi bermain, menari, demi untuk mencari popularitas diri saya.

Jadi saya sangat percaya Bapak dan Ibu, pasti mendukung saya dan saya siap Bapak dan Ibu marahin kapan saja, dimana saja. Saya pikir ini Bapak dan Ibu sekalian, agak sedikit terbawa semangat mohon maaf terlalu semangat, tapi karena secara prinsip ini adalah kepentingan bangsa kita. Saya yakin di Komisi IV DPR RI juga dulu permasalahannya pembahasannya sama tentang apa saya putuskan sebenarnya. Dulu Komisi IV DPR RI semangat dan artinya saya yakin sekarang butuh semangat yang sama bagaimana ini pengaduan masyarakat kita realisasikan. Masih banyak urusan lain dan saya sangat percaya urusan-urusan yang lain juga Bapak dan Ibu dukung kami. Saya betul ada kekurangan dalam tugas kami, kami butuh selalu diperingatkan, selalu diingatkan.

Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas dukungannya. Dirjen-dirjen saya setiap saat juga saya marahi kalau saya menemukan ada hal-hal yang agak lambat, Bapak Sekjen, semua jajaran. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, biarlah kalau itu kesalahan mereka itu jadi tanggungjawab saya. Semua yang saya putuskan adalah berdasarkan apa yang sudah mendapat suara dari keluhan-keluhan dari masyarakat yang ini kita implementasikan.

Demikian Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak dan Ibu sekalian, Anggota Komisi IV DPR RI. Jawaban dari saya nanti kami lengkapi dengan jawaban-jawaban terlengkap yang lebih detail lagi.

Terima kasih atas dukungannya.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Yang diminta oleh Bapak Ansi Lema perihal penelitian pada Rapat Dengar Pendapat akan datang minta tolong dibawa. Kalau masalah

penenggelaman kapal, saya sangat setuju sekali dengan kebijakan KKP yang sekarang. Untuk apa ditenggelamkan? Orang masih bisa dimanfaatkan. Dan ini Bapak-bapak Eselon I kan masih disini semua, tenggelamkan saja Ibu, dia tidak peduli, merusak lingkungan pun tidak apa-apa, tenggelamkan saja, pernah terjadi kan, pernah tidak terjadi, Dirjen pernah terjadi tidak? Penenggelaman kapal di taman nasional laut, betul? Pangandaran kan, merusak lingkungan tidak? Yang namanya kapal itu pasti ada mesin, ada oli, ada BBM, walaupun dikuras tidak mungkin bersih.

Terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Dari dialog, saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI sebelum acara ini kami akhiri, kami bacakan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini.

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan percepatan realisasi APBN tahun 2020 guna pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat pesisir.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan padat karya dan bantuan sosial yang secara nyata negara hadir di tengah-tengah masyarakat akibat Pandemi COVID-19, seperti kegiatan Gemar Ikan, Bulan Bakti Mutu Karantina, Bakti Nelayan, Pelatihan Masyarakat, Pendidikan Vokasi, Bantuan Benih Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan, Asuransi Usaha Budi Daya, Klaster Budi Daya Udang, Mesin dan Bahan Baku Pakan, Rumput Laut, Bioflok, Minapadi, PITAP, Ikan Hias, KJA Lobster, Maggot, *Cold Storage*, Rehabilitasi Mangrove, Kelompok Penggerak Konservasi, Pugar, Desa Wisata Bahari, dan Kelompok Masyarakat Pengawas serta penyaluran BLU-LPUMKP guna membantu memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yaitu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan, serta Masyarakat Pesisir.

Anggota ada yang mau ditambahkan?

Setuju, Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Bapak Ketua, untuk klaster budi daya udang sama dengan PITAP sudah masuk di klaster budi daya udang, jadi PITAP tidak perlu diisi Bapak Ketua, revitalisasi tambak Bapak Ketua, jadi PITAP jadi Sudha tidak perlu masuk revitalisasi tambak. Mohon maaf Bapak Ketua, PITAP tetap, revitalisasi tambak sudah tidak perlu karena sudah masuk dalam klaster budi daya udang.

KETUA RAPAT:

Revitalisasi tambak dihapus.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO):

Sudah Pak Ketua, setuju Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan semua program dan kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya di tahun-tahun sebelumnya, seperti MIAMARI di Morotai, PIAMARI di Pangandaran, serta pengadaan bantuan kapal dan alat penangkapan ikan (API). Apabila pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selesai, agar laporannya dapat disampaikan kepada Komisi IV DPR RI.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak?

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan semua prosedur perizinan ekspor benih bening lobster dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Indonesia, agar ke depan tidak timbul permasalahan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib berkomitmen dalam melaksanakan pengawasan kegiatan budi daya lobster dan pelepasan liar hasil budi daya lobster ke habitatnya serta pengawasan sumber daya kelautan perikanan agar tetap lestari.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Ini permintaan Pimpinan.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun infrastruktur Kantor Pelayanan Pembiayaan/Permodalan Pinjaman BLU-LPMUKP dan Kantor Konsultasi Program Asuransi Nelayan di seluruh TPI atau PPI di Indonesia.

Anggota?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Pak Ketua, kalau artinya harus bangun kantor baru kita belum punya anggaran tapi selama ini kita bisa taruh ditempat UPT-UPT kita yang ada. Sama mohon ijin BLU-LPMUKP dibalik Pak. Mohon arahan Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi ini bukan membangun baru Bapak Menteri, paling tidak gini loh di kantor PPI ada kantor pelayanan khusus.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Menyediakan fasilitas Pak, jangan infrastruktur, nanti dianggap kita membangun infrastruktur.

Ya Bapak Ketua, kita setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Saya ulangi lagi ya, karena tadi yang nulis ini bukan saya.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyediakan fasilitas Kantor Pelayanan Pembiayaan/Permodalan

Pinjaman BLU-LPMUKP dan Kantor Konsultasi Program Asuransi Nelayan di seluruh TPI atau PPI di Indonesia.

Setuju ya?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Jadi harusnya hal ini juga dilakukan di Kementerian Pertanian, Kantor Kementerian Pertanian punya namanya BP3 (Badan Penyuluhan Pertanian) tapi tidak digunakan. Jadi kalau ada orang mau konsultasi masalah asuransi ke Dinas, *Alhamdulillah* petugas dinasnya jarang ada. Jadi ini suatu hal yang sangat baik, ide dari Pimpinan Bapak Hasan Aminuddin.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum kami menutup Rapat Kerja hari ini, silakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja ini.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Bapak Ketua, boleh interupsi sedikit Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua, tadi saya sempat bicara soal sinkronisasi data karena 70% nelayan miskin itu datanya belum jelas. Saya usulkan itu perlu dimasukkan dalam kesimpulan ini karena penting sekali itu, supaya tetap sasar dan nelayan miskin inikan menjadi sasaran. Kita tidak tahu Covid ini akan berakhir sampai kapan. Itu kira-kira.

KETUA RAPAT:

Apa tidak kita masukkan nanti pada Rapat Dengar Pendapat, kan minggu depan ada Rapat Dengar Pendapat ya, apa kita masukkan saja dalam Rapat Dengar Pendapat.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Oke, baik saya catat Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ketua yang saya hormati, para Wakil Ketua, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Saya mengucapkan banyak terima kasih, tidak pernah henti-hentinya Bapak dan Ibu Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI membina kami, membela kami, mendukung kami, mengingatkan kami dalam setiap kesempatan. Ini satu modal besar kami dalam melangkah menyelesaikan tugas-tugas negara, menyelesaikan tugas-tugas untuk kemaslahatan orang banyak untuk membangun masyarakat nelayan seluruh Indonesia dalam semangat, bisa tersenyum dan bisa berbahagia. Mohon terus kami didukung, mohon terus kami diarahkan Bapak Ketua, kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk menjalankan semua arahan-arahannya.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti saya arahkan ke jalan yang benar ya Bapak Menteri.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabil'amin*, Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.26 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001